



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS

KKP
2025

panganbiru

08
POVERTY GROWTH

Laporan Kinerja BPPMHKP Pontianak

Triwulan I 2025

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Satuan Kerja atas penggunaan anggaran. Sehingga penyusunan Laporan Kinerja ini dapat selesai dengan baik sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Stasiun KIPM Pontianak pada Triwulan I Tahun 2025

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Stasiun KIPM Pontianak Triwulan I Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Laporan ini disusun berdasarkan realisasi hasil pelaksanaan Kegiatan Stasiun KIPM Pontianak selama Triwulan I Tahun 2025. Laporan ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai gambaran dan informasi tentang capaian kinerja SKIPM Pontianak Triwulan I Tahun 2025.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga pelaksanaan kegiatan Triwulan I Tahun 2025 dan penyusunan laporan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan ini di masa yang akan datang.

Pontianak, April 2025

Kepala Stasiun KIPM Pontianak


Jimmy Y. Elwaren

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

LAMPIRAN

BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	1
1.3 Arah Kebijakan dan Isu Strategis	4
1.4 Sistematika Penyajian	6
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	7
2.1 Sasaran	7
2.2 Indikator dan Target Kinerja	8
2.3 Pengukuran Kinerja.....	9
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	11
3.1 Capaian Kinerja.....	11
3.2 Analisis dan Evaluasi	13
3.3 Realisasi Anggaran	32
BAB IV. PENUTUP.....	33
4.1 Kesimpulan	33
4.2 Rekomendasi.....	33

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Indikator dan Target Kinerja SKIPM Pontianak 2025	8
Tabel 2 Rekapitulasi Capaian Kinerja Triwulan I 2025	11
Tabel 3 Target dan Realisasi IK 1	15
Tabel 4 Target dan Realisasi IK 2	17
Tabel 5 Target dan Realisasi IK 3	18
Tabel 6 Target dan Realisasi IK 4	20
Tabel 7 Target dan Realisasi IK 5	21
Tabel 8 Target dan Realisasi IK 6	22
Tabel 9 Target dan Realisasi IK 7	23
Tabel 10 Target dan Realisasi IK 8	24
Tabel 11 Target dan Realisasi IK 9	27
Tabel 12 Target dan Realisasi IK 10	28
Tabel 13 Target dan Realisasi IK 11	29
Tabel 14 Target dan Realisasi IK 12	30
Tabel 15 Target dan Realisasi IK 13	30
Tabel 16 Target dan Realisasi IK 14	31
Tabel 17 Realisasi Anggaran Triwulan I 2025	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi	4
Gambar 2 Peta Strategis SKIPM Pontianak 2025	7
Gambar 3 Dashboard Capaian IKU Pada SAPK	11

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) triwulan satu tahun 2025 merupakan bentuk laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pontianak selama satu triwulan tahun 2025. Pada tahun 2025 Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pontianak mempunyai 3 Sasaran Kegiatan dan 14 Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Awal Tahun 2025.

Untuk Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 secara keseluruhan termasuk berhasil, dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 114,67% berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja di www.kinerjaku.kkp.go.id. Indikator Kinerja yang telah mencapai target pada Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut :

SK. 1 Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan

1. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)
2. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)
3. Rasio Ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak

SK. 3 Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

4. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)
5. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang di umumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)
6. Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (Nilai)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang pj Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu asas penyelenggaraan good governance adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Laporan kinerja Tahun 2025 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban Stasiun KIPM Pontianak dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada tahun 2025 untuk mencapai visi dan misi Stasiun KIPM Pontianak. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja Stasiun KIPM Pontianak serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi perbaikan kinerja Stasiun KIPM Pontianak. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Tugas, Fungsi dan Stuktur Organisasi

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tanggal 29 September 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis, Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Pontianak ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Pontianak, mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugasnya, Stasiun KIPM Pontianak menyelenggarakan fungsi: a) pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia; b) pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan Negara tujuan; c) pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina/Hama dan Penyakit Ikan tertentu, jenis ikan dilindungi, dilarang, dibatasi, dan invasif, serta benda lain; d) pelaksanaan pengujian terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; e) pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (biosecurity); f) pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi; g) pelaksanaan pembuatan koleksi media pembawa, Hama dan Penyakit Ikan

Karantina dan/atau Hama dan Penyakit Ikan tertentu; h) pelaksanaan pemantauan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; i) pelaksanaan pengawasan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan; j) pelaksanaan surveilans terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan; k) pelaksanaan inspeksi, verifikasi,

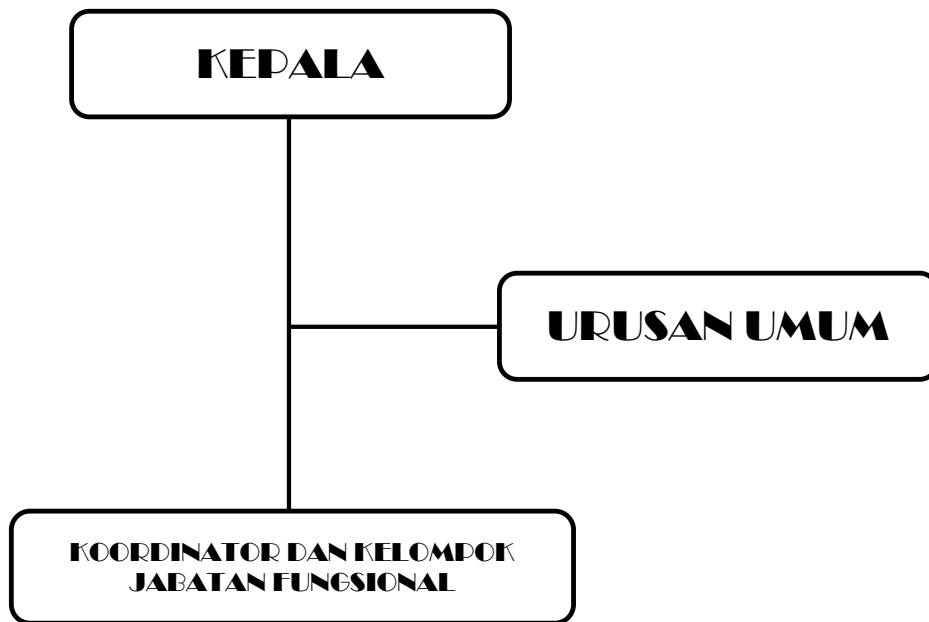
surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu; l) penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium; m) penindakan pelanggaran perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; n) pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan o) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut SJMHKP adalah Upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak praproduksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi Kesehatan manusia.

Salah satu fungsi utama BPPMHKP adalah pemberi Jaminan Kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan serta pemberian *Quality Assurance* terhadap industry dan perdagangan telah mendorong meningkatnya nilai tambah, daya saing, hilirisasi industry, pertumbuhan ekspor hasil kelautan dan perikanan dan investasi yang memberikan manfaat pertumbuhan perekonomian nasional. Berdasarkan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, bahwa BPPMHKP merupakan unit Essselon I di Kementrian Kelautan dan Perikanan yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

Kegiatan pengendalian system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan (SJMHKP) dilakukan bertujuan untuk memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan mulai dari produksi primer (perikanan budidaya dan tangkap), pengolahan hingga distribusi hasil perikanan. Sesuai pasal 4 PERMEN KP No. 8 tahun 2024, menteri memberikan kewenangan kepada kepala Badan sebagai otoritas Kompeten untuk melakukan pengendalian sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Dalam Melaksanakan tugas dan fungsi Stasiun KIPM dipimpin oleh seorang kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) merupakan unsur pelaksana Kementerian Kelautan dan Perikanan dibidang perkarantinaan ikan, dengan susunan organisasi yang terdiri dari : a) Urusan Umum dan; b) Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1 Struktur Organisasi

1.3 Arah Kebijakan dan Isu Strategis

Arah kebijakan dan strategi pembangunan Stasiun KIPM Pontianak disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi Stasiun KIPM Pontianak adalah sebagai berikut:

- Strategi untuk mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pengelolaan produksi perikanan tangkap maupun budidaya adalah dengan memberikan jaminan kesehatan, kualitas, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar dan regulasi nasional.

- Strategi untuk mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional.
- Strategi untuk mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif adalah meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri, dan pengawasan keamanan hayati ikan, termasuk ikan yang dilindungi, dilarang dan/atau dibatasi dan ikan asing yang bersifat invasif di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran, di pos lintas batas negara, dan di SKPT yang berada di pulau terluar melalui meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha dan pengguna jasa karantina, pembinaan, dan penindakan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina ikan dan perikanan
- Strategi yang dilaksanakan dalam upaya melindungi sumber daya hayati ikan untuk berkelanjutan adalah meningkatkan efektifitas tindakan karantina dalam rangka mencegah masuk dan menyebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah NKRI, maupun antar area di dalam wilayah NKRI.
- Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan arus barang dalam mendukung sistem logistik ikan nasional (SLIN) adalah memperlancar arus lalu lintas produk perikanan ekspor yang secara signifikan menurunkan dwelling time pada proses importasi produk perikanan dan ekspor melalui penerapan INSW dan pengembangan join inspection dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
- Strategi yang dilaksanakan dalam dan metode pengujian, serta informasi publik.

- Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan validitas metode pengujian hama dan penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah meningkatkan kompetensi laboratorium acuan dan menambah ruang lingkup pengujian.
- Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri adalah penyediaan sarana dan prasarana IT dan peningkatan kompetensi SDM aparatur analis data.
- Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara berupa PNBP-BKIPM adalah optimalisasi sistem pengawasan PNBP berbasis digital.

1.4 Sistematika Penyajian

Sistematika dan penyajian LKJ Stasiun KIPM Pontianak Tahun 2025 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku seperti dalam Permenpan RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

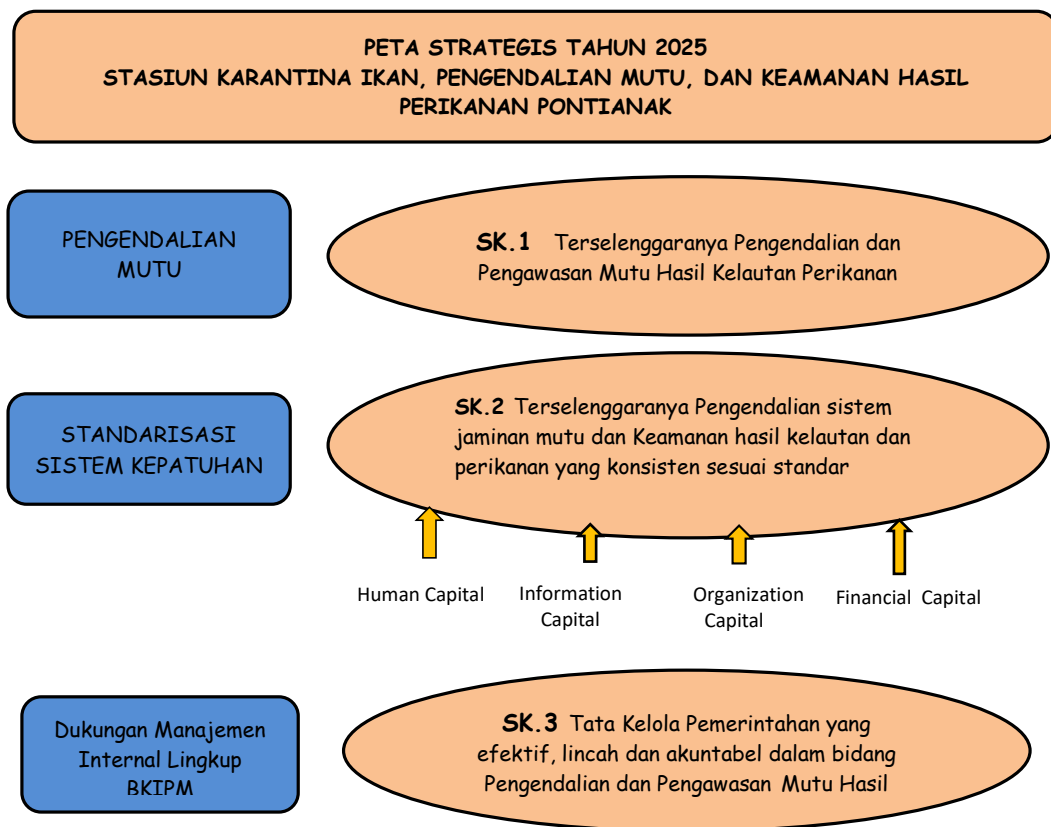
- Bab I - Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi;
- Bab II - Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
- Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
- Bab IV - Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur. Peta strategi, sasaran dan indikator kinerja Stasiun KIPM Pontianak tahun 2025 ditunjukkan pada Gambar 2 dan Tabel 1 di bawah ini.



Gambar 2 Peta Strategis SKIPM Pontianak 2025

2.2 Indikator dan Target Kinerja

Pada Tahun 2025 Stasiun KIPM Pontianak mempunyai indikator dan target kinerja sebanyak 14, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel. 1 Indikator dan Target Kinerja Stasiun KIPM Pontianak 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 1. Pengendalian Mutu				
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)	70
		2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)	70
		3	Rasio Ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak	99
Kegiatan 2. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan				
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan Keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (Nilai)	75
		5	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (Nilai)	75
Kegiatan 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM				
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	6	Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (Nilai)	92
		7	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (Nilai)	71,5
		8	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)	100
		9	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (Indeks)	87
		10	Penilaian Nandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (Nilai)	86
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)	85

		12	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang di umumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)	76
		13	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)	70
		14	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (Nilai)	88

2.3 Pengukuran Kinerja

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku, yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

1. angka maksimum adalah 120;
2. angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capain IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:
 - a. Polarisasi Maximize
Pada polarisasi maximize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula:
Indeks Capaian IKU = Realisasi/Target x 100%
 - b. Polarisasi Minimize
Pada polarisasi minimize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula:
Indeks Capaian IKU = {(1 + (1-Realisasi/Target)) x 100%
 - c. Polarisasi Stabilize
Pada polarisasi stabilize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.

4. Status indeks capaian IKU adalah sebagai berikut:



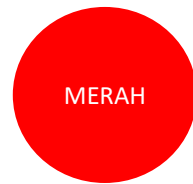
$100 \leq X \leq 120$

(memenuhi ekspektasi)



$80 \leq X < 100$

(Belum memenuhi ekspektasi)



$X < 80\%$

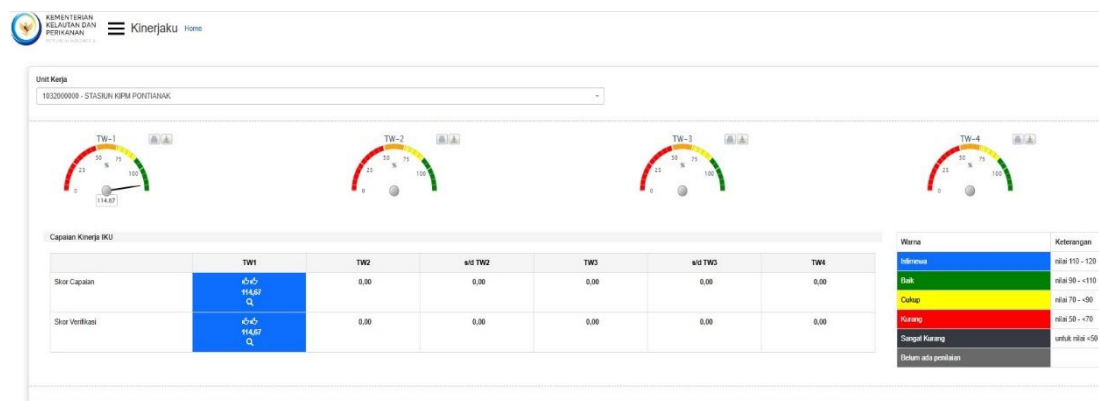
(tidak memenuhi ekspektasi)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Capaian kinerja SKIPM Pontianak pada Tahun 2025 sudah baik, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 114,67 berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja (SAPK) di www.kinerjaku.kkp.go.id.



Gambar 3 Dashboard Capaian IKU Pada SAPK

Rekapitulasi capaian kinerja BKIPM Pontianak Tahun 2025 secara keseluruhan, dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel. 2 Rekapitulasi Capaian Kinerja Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	REALISASI
Kegiatan 1. Pengendalian Mutu					
SK. 1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)	70	100
		2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)	70	100

		3	Rasio Ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak	99	100
Kegiatan 2. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan					
SK. 2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan Keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (Nilai)	75	
		5	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (Nilai)	75	
KEGIATAN 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM					
SK. 3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	6	Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (Nilai)	92	
		7	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (Nilai)	71,5	
		8	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)	100	
		9	Indeks Profesionalitas ASN lingkupp UPT Stasiun KIPM Pontianak (Indeks)	87	
		10	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (Nilai))	86	
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)	85	100

		12	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)	76	100
		13	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)	70	
		14	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (Nilai)	88	96,22

3.2 Analisis dan Evaluasi

Kegiatan Pengendalian Mutu

Capaian kinerja SKIPM Pontianak pada Kegiatan Pengendalian Mutu berasal dari satu sasaran strategis, yakni Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan.

Sasaran Kegiatan 1. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan

Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan adalah tolok ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan BKIPM. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan lingkup UPT SKIPM Pontianak.

IK 1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)
--------------	---

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB,CPIB,CPPIB,CPOIB, CDOIB dan

perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI)
2. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku

Output kegiatan berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil inspeksi dalam sistem OSS maupun secara manual

Pada Tahun 2025 TW I, Untuk IK 1 yaitu Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu Dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%) di Targetkan sebesar 70 %, Untuk IK 1 Pada tanggal 25 Januari 2025 Inspektur mutu BPPMHKP Pontianak melaksanakan Inspeksi Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas Kapal (CPIB Kapal) atas nama Kapal Kakap Jaya I di Pelabuhan Perikanan Pantai Sungai Rengas Provinsi Kalimantan Barat dengan nama pemilik kapal Bpk. Yulianto,

Untuk IK 1 yaitu Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu Dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak sudah terealisasi 100%.

Capaian IKU ini diperoleh dengan melalui perhitungan sebagai berikut :

$$\%X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} X 100\%$$

- % X = Jumlah hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer
 A = Jumlah Unit Usaha yang menerapkan CBIB
 B = Jumlah Unit menerapkan CPIB
 C = Jumlah Unit Usaha yang menerapkan CPPIB
 D = Jumlah Unit Usaha menerapkan CPOIB
 E = Jumlah Unit Usaha menerapkan CPOIB yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan
 F = Jumlah Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal (1)
 Xn = Jumlah dari unsur pembentuk (6)* (1)

$$\%X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$$

$$\%X = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Tabel. 3 Target dan Realisasi IK 1

Indikator Kinerja	TW I 2025	
	Target (%)	Realisasi (%)
Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu Dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)	70	100

IK 2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)
-------------	--

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan

dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
2. Standar Internasional (Codex Alimentarius)
3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.

Pada Tahun 2025 TW I, Untuk IK 2 yaitu Persentase Hasil Kelautan Dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Yang Memenuhi Standar Mutu Dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%) di targetkan sebesar 70 %. Untuk IK 2 pada tahun 2025 ini UPT SKIPM Pontianak sudah mengeluarkan 9 sertifikat SKP (Sertifikat Kelayakan Pengolahan) Inspeksi dilakukan di 3 UPI yaitu CV. Jesslyn Indah Lestari, CV. Sukses bintang Paloh dan CV. Jaya Kota

Capaian IKU ini diperoleh dengan melalui perhitungan sebagai berikut

% X	=	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan
A	=	Persentase penerbitan sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup Produk
B	=	Persentase SKP yang diterbitkan di unit pengolahan ikan skala UMKM dan menengah besar GMPSSOP (9)
xn	=	Jumlah dari unsur pembentuk (9)

$$\%X = \frac{A+B}{xn} \times 100\%$$

$$\%X = \frac{9}{9} \times 100\% = 100\%$$

untuk IK 2 yaitu Persentase Hasil Kelautan Dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Yang Memenuhi Standar Mutu Dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak sudah terealisasi 100%.

Tabel. 4 Target dan Realisai IK 2

Indikator Kinerja	TW I 2025	
	Target (%)	Realisasi (%)
Persentase Hasil Kelautan Dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Yang Memenuhi Standar Mutu Dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)	70	100

IK 3

Rasio Ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor).

Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional.

Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan Bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

Pada Tahun 2024 TW I, Untuk IK 3 yaitu Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Yang Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%) di targetkan sebesar 99% pada tahun 2025 Triwulan I tidak ada penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan ke negara tujuan ekspor dengan jumlah sertifikat yang di terbitkan sebanyak 52 sertifikat, dikarenakan tidak ada penolakan untuk IK 3 yaitu Rasio Ekspor Ikan dan Hasil

Perikanan Yang Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak terealisasi 100%

Capaian IKU ini diperoleh dengan melalui perhitungan sebagai berikut :

$$X = \frac{A-B}{A} \times 100 \%$$

- X = Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)
A = HC yang diterbitkan oleh BPPMHKP (52)
B = Jumlah HC yang ditolak oleh negara lain (0)

$$X = \frac{A-B}{A} \times 100 \% \qquad X = \frac{52-0}{52} \times 100\% = 100 \%$$

Pada Tahun 2025 TW I, Untuk IK 3 yaitu Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu dan Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak sudah terealisasi 100 %.

Tabel. 5 Target Dan Realisasi IK 3

Indikator Kinerja	TW I 2025	
	Target (%)	Realisasi (%)
Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu dan Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak	70	100

Kegiatan Standarisasi Sistem dan Kepatuhan

Capaian kinerja SKIPM Pontianak pada Kegiatan Standarisasi dan Sistem Kepatuhan Pengendalian Mutu berasal dari satu sasaran strategis, yakni Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif.

Sasaran Strategi 2. Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten Sesuai Standar.

Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten sesuai Standar menjadi tolak ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan BKIPM. Indikator kinerja

yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten sesuai Standar (Kegiatan Standarisasi dan Sistem Kepatuhan) lingkup UPT SKIPM Pontianak

IK 4

Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (Nilai)

Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan Lembaga inspeksi merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025 dan ISO/IEC 17020 dan dinyatakan dalam bentuk presentase berdasarkan Tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki.

ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium pengujian yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri

Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian (ISO 17025) di laboratorium *official control* yang dinilai melingkupi:

1. Ruang Lingkup;
2. Acuan Normatif
3. Persyaratan Umum
4. Persyaratan Struktural
5. Persyaratan Sumber Daya
6. Persyaratan Proses
7. Persyaratan Sistem Manajemen

Pada Tahun 2025 TW I, Untuk IK 4 yaitu Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (Nilai) belum ditargetkan dan belum terealisasi di karenakan untuk IK ini frekuensi perhitungannya Tahunan.

Tabel. 6 Target Dan Realisasi IK 4

Indikator Kinerja	TW I 2025	
	Target (%)	Realisasi (%)
Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (Nilai)	75	-

IK 5	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga Inpeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (Nilai)
-------------	--

Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025 dan ISO/IEC 17020 dan dinyatakan dalam bentuk presentase berdasarkan Tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki.

ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan. Nilai kualitas penerapan ISO/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi (ISO 17020) yang dinilai melingkupi:

1. Persyaratan Umum
2. Persyaratan Struktural

3. Persyaratan Umum
4. Persyaratan Proses
5. Persyaratan Sistem Manajemen

Pada Tahun 2025 TW I, Untuk IK 5 yaitu Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga Inpeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (Nilai) belum ditargetkan dan belum terealisasi di karenakan untuk IK ini frekuensi perhitungannya Tahunan.

Tabel. 7 Target Dan Realisasi IK 5

Indikator Kinerja	TW I 2025	
	Target (%)	Realisasi (%)
Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga Inpeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (Nilai)	75	-

IK 6 Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (Nilai)

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain

- a. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- b. Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;
- c. Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau
- d. Kurang, apabila nilai IKPA < 70

Pada tahun 2025 TW I untuk IK 6 Yaitu Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (Nilai) belum ditargetkan dan belum terealisasi karena untuk IK ini frekuensi perhitungannya semester.

Tabel. 8 Target Dan Realisasi IK 6

Indikator Kinerja	TW I 2025	
	Target (%)	Realisasi (%)
Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (Nilai)	92	-

Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM

Capaian kinerja SKIPM Pontianak pada Kegiatan Sekretariat BKIPM berasal dari satu sasaran strategis, yakni Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKIPM.

Sasaran Strategi 3. Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak.

Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKIPM menjadi tolok ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan BKIPM. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak.

IK 7	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (Nilai)
-------------	--

Nilai Kinerja Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Target Akhir Tahun Anggaran 2024 Level 0 (K/L) 82,00 Kategori Nilai Kinerja Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain:

1. Sangat Baik, apabila NKA > 90;
2. Baik, apabila NKA >80 – 90;
3. Cukup, apabila NKA >60 – 80;
4. Kurang, apabila NKA >50 – 60;
5. Sangat Kurang, apabila NKA ≤ 50

Persentase tindak lanjut atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BKIPM merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas system pengendalian intern.

Pada tahun 2025 TW I untuk IK 7 yaitu Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (Nilai) belum ditargetkan dan belum terealisasi dikarenakan frekuensi perhitungannya tahunan.

Tabel. 9 Target Dan Realisasi IK 7

Indikator Kinerja	TW I 2025	
	Target (%)	Realisasi (%)
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (Nilai)	71,5	-

IK 8

Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BPPMHKP merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.

Pada Tahun 2025 TW I IK 8 yaitu Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%) belum ditargetkan dan belum terealisasi dikarenakan frekuensi perhitungannya tahunan.

Tabel. 10 Target Dan Realisasi IK 8

Indikator Kinerja	TW I 2025	
	Target (%)	Realisasi (%)
Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)	100	-

IK 9	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (Indeks)
-------------	---

Indeks Profesionalitas ASN adalah sebuah indikator untuk mengukur tingkat profesionalitas individu atau kelompok dalam suatu organisasi (Renstra BKN 2015– 2019). Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, diperlukan upaya peningkatan kelembagaan, ketatalaksanaan, profesionalitas ASN. Peningkatan profesionalitas ASN sebagai motor penyelenggara negara perlu didorong pada aspek kerja, integritas, dan kompetensi agar mampu memberikan pelayanan publik secara optimal. Pembinaan ASN diarahkan pada tujuan peningkatan kinerja individu dan kinerja organisasi agar tercapai tujuan pembangunan secara nasional. Dengan profesionalisme ASN diharapkan setiap organisasi pemerintahan dapat berjalan untuk mencapai tujuan sesuai dengan misi dan visinya. Optimalisasi standar kinerja sangat diharapkan oleh organisasi maupun para pihak yang berkepentingan termasuk masyarakat guna mendapatkan pelayanan yang baik sejalan dengan prinsip good governance. Pengukuran indeks profesionalitas diperlukan guna mengetahui tingkat kesesuaian antara kompetensi pegawai ASN dengan kualifikasi persyaratan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas jabatan. Indeks profesionalitas ASN adalah salah satu cara mendekati kualitas ASN dengan menggunakan indeks komposit dari beberapa indikator output yang bersifat independen (Sutiadi, 2016: 56). Pengukuran indikator outcome dengan menggunakan composite index

sangat umum digunakan oleh para perencana dan evaluator. Kekuatan indikator ini adalah mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai capaian suatu program. Penyusunan indikator indeks sangat bergantung pada kekuatan teori atas tujuan yang hendak dicapai. Pemilihan indikator berdasarkan teori yang dibangun akan menyempurnakan indeks, sehingga akan lebih mendekati kesesuaian. Semakin banyak komponen output yang tersedia, maka akan semakin mendekatkan penilaian pada kondisi yang sesungguhnya.

Profesionalisme pegawai dalam sebuah organisasi sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan yang tercemin melalui perilaku sehari-hari. Kemampuan menunjukkan potensi dalam melaksanakan tugas yang mungkin dan tidak mungkin dilakukan. Sedangkan profesional dalam pendekatan sistem merit mengandung persyaratan kompetensi (pengetahuan, keahlian, pengalaman), kualifikasi (pendidikan, pelatihan), kinerja (target, pencapaian), kompensasi (kebutuhan, external equity), dan disiplin. Berdasarkan hal tersebut, maka indikator yang digunakan untuk mengukur indeks profesionalitas ASN adalah kompetensi, kinerja, kompensasi, dan disiplin, dengan rumus matematis sebagai berikut $IdxPro = koef(1 - gaps) + Koef(Kj) + Koef(1 - \delta S1) + Koef(1 - inDiscpl)$ Keterangan: Gaps : Persentase ASN yang tidak kompeten Kj : Angka SKP $\delta S1$: Selisih rata-rata gaji dan tunjangan kinerja ASN untuk jabatan yang sama (%), inDiscpl : Jumlah pelanggaran disiplin. Pada kenyataannya sering terjadi teori yang dibangun sudah sangat baik, namun data yang dibutuhkan kurang tersedia. Ketidaktersediaan data dapat terjadi secara permanen dimana data belum dikumpulkan secara parsial seperti tidak tersedia pada setiap tahun, atau waktu pengambilan data tidak sesuai dengan harapan. Ketidaktersediaan data permanen dapat diatasi melalui penggunaan data proxy dengan memperhatikan data-data sejenis atau data yang berhubungan dengan output sebagaimana diharapkan. Penggunaan data proxy dapat menyebabkan tingkat validitas berkurang karena terjadi deviasi, namun demikian deviasinya sudah dapat diperkirakan sebelumnya sehingga nilai validitas masih dapat dipertanggungjawabkan.

Ketidaktersediaan data yang parsial dapat juga menjadikan indeks komposit yang dibangun menjadi kurang reliable karena terdapat data yang

tidak terisi. Hal ini karena nilai yang diperoleh merupakan kekosongan angka yang telah dikalikan dengan angka koefisien yang telah ditetapkan. Akibatnya, hasil penghitungan mengalami deviasi menjauh dari nilai validitas yang diharapkan dan nilainya tidak dapat diperkirakan. Berdasarkan teori yang dikembangkan bahwa indeks profesionalitas ASN merupakan fungsi dari kompetensi, kinerja, gaji, dan disiplin. Premis indikator profesionalitas ASN adalah (individu) pegawai akan semakin profesional apabila kompetensinya semakin tinggi, kinerjanya semakin meningkat, penghasilannya semakin baik, dan disiplin pegawai yang tinggi. Adapun data-data yang dapat digunakan untuk menghitung indeks profesionalitas ASN berasal dari sumber yang tervalidasi, seperti; Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), Pendataan Ulang PNS (e-PUPNS), pemetaan PNS, daftar gaji dan tunjangan PNS, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dan data hukuman pegawai.

Data kompetensi seharusnya berasal dari data e-PUPNS yang cukup lengkap mengenai pendidikan, pengalaman, dan pelatihan dari tiap-tiap individu. Hanya saja data ini bukan bersifat kompetensi, melainkan potensi. Potensi meskipun tidak sepenuhnya mewakili dan dapat menjadi data proxy untuk kompetensi. Dengan demikian premis berubah bahwa semakin profesional pegawai apabila semakin sesuai dengan potensinya. Data kinerja yang berasal dari SKP diasumsikan semakin tinggi nilai SKP, maka akan semakin profesional seseorang pegawai. Meskipun data SKP telah tersedia dengan lengkap, walaupun substansi kinerja itu sendiri masih memerlukan perbaikan namun dapat digunakan. Data gaji atau kompensasi untuk mengukur tingkat profesionalitas pegawai dapat didekati dengan pemberian kompensasi yang sesuai dengan beban kerja dan risiko, baik secara internal maupun eksternal. Sedangkan data organisasi yang modern bisa digunakan untuk mengukur tingkat kedisiplinan seorang pegawai dalam bekerja dengan cara dilakukan proxy, dimana seorang pegawai dinilai semakin profesional apabila tingkat pelanggarananya semakin rendah. Untuk membangun pegawai yang bersih dan profesional kegiatan yang dilakukan adalah menegakkan integritas. Pada Triwulan III tidak ditargetkan dan belum terealisasi.

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistic yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Pada Tahun 2025 TW I, Untuk IK 9 yaitu Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (Indeks) ditargetkan sebesar 87, untuk IK ini belum ditargetkan dan belum terealisasi dikarenakan frekuensi perhitungannya semester.

Tabel. 11 Target Dan Realisasi IK 9

Indikator Kinerja	TW I 2025	
	Target (%)	Realisasi (%)
Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (Indeks)	87	-

IK 10 Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (Nilai)

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran (input) atau kegiatan (output) semata menjadi berorientasi kepada hasil atau outcome.

Nilai PM SAKIP Level II dihitung berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni

perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Level II merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di lingkungan BPPMHKP.

Pada Tahun 2025 IK 10 yaitu Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (Nilai) belum ditargetkan dan belum terealisasi dikarenakan frekuensi perhitungannya tahunan.

Tabel. 12 Target Dan Realisasi IK 10

Indikator Kinerja	TW I 2025	
	Target (%)	Realisasi (%)
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (Nilai)	86	-

IK 11 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang terbit pada Triwulan IV tahun 2023 s.d Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) yang menjadi objek pengawasan.

Nilai Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Lingkup BPPMHKP menggunakan nilai Eselon I BPPMHKP.

CARA PENGUKURAN

$$\frac{\sum N_t}{\sum N} \times 100$$

$\sum N_t$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti

$\sum N$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan

Pada Tahun 2025 IK 11 yaitu Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%) ditargetkan sebesar 85 % dan untuk ini sudah terealisasi sebesar 100%

Tabel. 13 Target Dan Realisasi IK 11

Indikator Kinerja	TW I 2025	
	Target (%)	Realisasi (%)
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)	85	100

IK 12 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa adalah Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa sesuai ketentuan yang berlaku.

Tingkat Kepatuhan PBJ diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut :

1. RUP telah diupload kedalam aplikasi SIRUP (20%)
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%)
3. Laporan Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%)
4. Kesesuaian Tahap Pelaksanaan (30%)

Pada Tahun 2025 TW I IK 12 yaitu Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%) di targetkan sebesar 76%. Untuk IK 12 ini sudah terealisasi d sebesar 100%.

Tabel. 14 Target Dan Realisasi IK 12

Indikator Kinerja	TW IV 2024	
	Target (%)	Realisasi (Nilai)
Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)	76	100

IK 13 Persentase Pemenuhan dokumen Pembangunan Zona Integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)

Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen system antikorupsi, yang meliputi :

- a. Pembangunan zona interitas (bobot 30%)
- b. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%)
- c. Penanganan pengaduan masyarakat dan WBS (bobot 15%)
- d. Penanganan benturan kepentingan (bobot 15%)
- e. Pelaporan Harta Kekayaan (LHKAN) (bobot 15%)
- f. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%)

Pada Tahun 2025 IK 13 yaitu Persentase Pemenuhan dokumen Pembangunan Zona Integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%) belum ditargetkan dan belum terealisasi dikarenakan frekuensi perhitungannya tahunan.

Tabel. 15 Target Dan Realisasi IK 13

Indikator Kinerja	TW IV 2024	
	Target (%)	Realisasi (Nilai)
Persentase Pemenuhan dokumen Pembangunan Zona Integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)	70	-

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPMHKP menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: https://ptsp.kkp.go.id/skm/login_Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing UPT BPPMHKP.

Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisio

Pada Tahun 2025 TW I, IK 14 yaitu Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%) ditargetkan sebesar 88, untuk IK 14 ini sudah terealisasi sebesar 96,22 %

Tabel. 16 Target Dan Realisasi IK 14

Indikator Kinerja	TW IV 2024	
	Target (%)	Realisasi (Nilai)
Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (Nilai)	88	96,22

3.2 Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran SKIPM Pontianak pada tahun anggaran (T.A) 2025 adalah sebesar Rp. 8,073,187,000. Realisasi penyerapan anggaran SKIPM Pontianak pada tahun 2025 baru sebesar Rp. 1,280,680,237 atau sebesar 15.86 %.

Tabel. 17 Realisasi Anggaran TW I



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KELAS I PONTIANAK

PAGU DAN REALISASI BELANJA

Bulan : 01 s.d. 03

No	BA-Satker	Nama Satker	KPPN	Ket	Jenis Belanja										Total
					Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	Bansos	Lain-lain	Transfer		
1	032-567538	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PONTIANAK	042	PAGU	4.490.112.000	3.583.075.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.073.187.000
				REALISASI	849.901.640	430.778.597	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.280.680.237	
				PERSENTASE	(18.93%)	(12.02%)								(15.86%)	
				SISA	3.640.210.360	3.152.296.403	0	0	0	0	0	0	0	6.792.506.763	
				TOTAL	PAGU	4.490.112.000	3.583.075.000	0	0	0	0	0	0	0	8.073.187.000
		REALISASI	849.901.640	430.778.597	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	1.280.680.237		
		PERSENTASE	(18.93%)	(12.02%)									(15.86%)		
		SISA	3.640.210.360	3.152.296.403	0	0	0	0	0	0	0	0	6.792.506.763		
Disclaimer: Realisasi berbasis kas dan bersifat netto (memperhitungkan pengembalian belanja sebagai pengurang realisasi) sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Laporan Ketersediaan Dana (FA)															

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja UPT Stasiun KIPM Pontianak Tahun 2025 menyajikan keberhasilan dan Kegagalan, yang tercermin dalam capaian indikator kinerja utama. Capaian kinerja SKIPM Pontianak pada Tahun 2025 Triwulan I sudah baik, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 114,67 berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja (SAPK) di www.kinerjaku.kkp.go.id. Dari 14 Indikator Kinerja terdapat 6 (42,86%) indikator kinerja yang capaiannya melebihi target, dan 8 (57,14) Indikator kinerja yang belum mencapai target karena di targetkan pada triwulan berikutnya.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Stasiun KIPM Pontianak pada tahun 2025, sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

- Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik (bulanan, triwulan, semester) berdasarkan rencana aksi yang telah disusun untuk mengawal pencapaian kinerja dan melakukan evaluasi terhadap indikator kinerja yang capaiannya sangat dipengaruhi oleh eksternal.
- Mengingat Indikator Kinerja terkait dengan IP ASN, ditargetkan per semester, agar pemenuhan aspek-aspek IP ASN Pegawai lebih ditingkatkan, agar hasilnya dapat sesuai target.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAM www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN PONTIANAK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Jimmy Yonathan Elwaren**
Jabatan : Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pontianak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**
Jabatan : Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2025

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama

Kepala Stasiun Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan Pontianak



Ditandatangani
Secara Elektronik

Jimmy Yonathan Elwaren

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN PONTIANAK

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)	70
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)	70
		3.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak	99
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (Nilai)	75
		5.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (Nilai)	75
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	6.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (Nilai)	92
		7.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (Nilai)	71,5
		8.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)	100
		9.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (Indeks)	87
		10.	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (Nilai)	86
		11.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)	85
		12.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)	76
		13.	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)	70%
		14.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (Nilai)	88

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	6.557.341.330
2.	Manajemen Mutu	144.000.000
3.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	177.000.000
Total Anggaran Stasiun KIPM Pontianak Tahun 2025		6.878.341.330

Jakarta, 31 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama
Kepala Stasiun Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan Pontianak



Ditandatangani
Secara Elektronik

Jimmy Yonathan Elwaren



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Ministry of Marine Affairs and Fisheries
Marine and Fisheries Quality Assurance Agency

SERTIFIKAT CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK
GOOD HANDLING PRACTICES CERTIFICATE

NOMOR : ID - CPIB - K - 61 - 250045

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Kelautan dan Perikanan

Based on Having regards to the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Republic of Indonesia No. 10 of 2021 laying down Standard for Business Activities in the Implementation of Risk-Based Business Licensing in the Marine and Fisheries sector

menetapkan bahwa
to certify that

<u>Kapal Perikanan</u> <i>Fishing Vessel</i>	: KM. Kakap Jaya 1
<u>Alamat</u> <i>Address</i>	: Jl.H.R.A. Rahman, Komplek Pawan Permai No A15, Kel. Sungaijawi, Kec. Pontianak Kota, Pontianak, Kalimantan Barat
<u>Ukuran Kapal</u> <i>Size of fishing vessel</i>	: 30 GT
<u>Tipe Kapal</u> <i>Type of fishing vessel</i>	: Kapal Penangkap <i>Fishing Vessel</i>
<u>Tanggal Inspeksi</u> <i>Inspection date</i>	: 25 Januari 2025 <i>25 January 2025</i>
<u>Jenis Produk</u> <i>Commodity</i>	: Ikan Pelagis Segar <i>Fresh Pelagic Fish</i>
<u>Pemeringkatan</u> <i>Grade</i>	: D

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan Cara Penanganan Ikan yang Baik
Is declared to have fulfilled in Good Handling Practice requirements

Dikeluarkan di : Jakarta
Issued in

Pada tanggal : **3 Februari 2025**
Date : **3 February 2025**

Berlaku sampai : **3 Februari 2027**
Valid until : **3 February 2027**

Kepala BPPMHKP
Director General of MFQAA



Ir. Ishartini



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN (SKP)

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
BUSINESS LICENSE TO SUPPORT BUSINESS ACTIVITIES

PB-UMKU:812001113016800060001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) kepada Pelaku Usaha berikut ini:

The Government of the Republic of Indonesia has accepted and issued the Business License to Support Business Activities, to the company named below:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha
<i>Company Name</i> | : CV JAYA KOTA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
<i>Business Registration Number</i> | : 8120011130168 |
| 3. Alamat Kantor
<i>Office Address</i> | : Jl. Kom Yos Sudarso, Gg. Salak IV No 8,
Desa/Kelurahan Sungaijawi Luar, Kec.
Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi
Kalimantan Barat |
| Kode Pos
<i>Postal code</i> | : 78113 |
| 4. Status Penanaman Modal
<i>Investment Status</i> | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
<i>Domestic Direct Investment</i> |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
<i>Indonesia Standard Industrial Classification Code</i> | : 46206 - Perdagangan Besar Hasil
Perikanan
<i>46206 - Large Trade in Fishery Product</i> |
| 6. Lokasi Usaha
<i>Business Location</i> | : Jl. Kom Yos. Sudarso, Gg. Salak IV No. 8
Desa/Kelurahan Sungaijawi Luar, Kec.
Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi
Kalimantan Barat |
| Kode Pos
<i>Postal code</i> | : 78113 |

Telah memenuhi persyaratan berikut :

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS system is the business owner's responsibility.
2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSR-E-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the user's account.



The company name has met these requirements:

1. Perizinan Berusaha Subsektor Pengolahan Ikan dan/atau Pemasaran Ikan.
Business License for Fish Processing and/or Fish Marketing Subsector.
2. Sertifikat Pengolah Ikan atau sertifikat keterampilan.dibidang keamanan pangan yang setara bagi penanggung jawab mutu.
Fish Processing Certificate or Certificate of Skills in Food Safety Field Equal to Person in Charge of Quality Assurance.
3. Panduan mutu penerapan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan pemenuhan persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi.
Quality Guideline for The Good Manufacturing Practices of Fish Processing Implementation and Compliance The Requirement of Standard Operational Procedures of Hygiene.
4. Rekomendasi Kelayakan Pengolahan dari Pembina Mutu di Daerah.
Processing Feasibility Recommendations from Regional Quality Supervisors.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

This Business License to Support Business Activities attachment contains technical data inseparable from the document. The company name above must operate the business according to the prevailing laws and regulations.

Diterbitkan tanggal : 11 Maret 2025
Issued date : 11 March 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi /
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,
*p.p. Ministry of Marine Affairs and Fisheries
Ministry of Investment and Downstreaming /
Chairman of Indonesia Investment
Coordinating Board*



Ditandatangani secara elektronik
Electronic signature

Dicetak tanggal : 12 Maret 2025
Printed date : 12 March 2025

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS system is the business owner's responsibility.
2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSrE-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the user's account.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
BUSINESS LICENSE SUPPORTING BUSINESS ACTIVITIES

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN
CERTIFICATE OF GOOD MANUFACTURING PRACTICES

LAMPIRAN
ATTACHMENT

PBUMKU: 812001113016800060001

1. Nomor Seri
Serial Number : P.: 00038119
2. Nomor SKP
GMP Certificate Number : 36051/61/SKP/BK/III/2025
3. Nama Unit Pengolahan Ikan
Name of Fish Processing Plant : CV. JAYA KOTA
4. Jenis Produk
Type of Product(s) : Cephalopoda Beku (Sotong, Cumi-cumi)
Frozen Cephalopods (Cuttlefish, Squid)
5. Tahapan Pengolahan
Processing Steps : Penerimaan, Penanganan, Pembekuan,
Pengemasan/Pelabelan, Penyimpanan Beku, Pemuatan
Receiving, Handling, Freezing, Packing/Labelling, Cold
Storing, Stuffing
6. Peringkat
Ranking : C

Sertifikat ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan tetap memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene, atau kurang dari dua tahun apabila terjadi pelanggaran keamanan pangan

This certificate is valid for 2 (two) years and met the sanitation and hygiene requirement or less than two years in case of food safety violations

Dikeluarkan di
Issued in : Jakarta

Tanggal
Date : 11 Maret 2025
11 March 2025

Berlaku sampai dengan
Valid until : 11 Maret 2027
11 March 2027

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS system is the business owner's responsibility.
2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSR-E-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the user's account.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN (SKP)

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
BUSINESS LICENSE TO SUPPORT BUSINESS ACTIVITIES

PB-UMKU:812001113016800060003

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) kepada Pelaku Usaha berikut ini:

The Government of the Republic of Indonesia has accepted and issued the Business License to Support Business Activities, to the company named below:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha
<i>Company Name</i> | : CV JAYA KOTA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
<i>Business Registration Number</i> | : 8120011130168 |
| 3. Alamat Kantor
<i>Office Address</i> | : Jl. Kom Yos Sudarso, Gg. Salak IV No 8,
Desa/Kelurahan Sungaijawi Luar, Kec.
Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi
Kalimantan Barat |
| Kode Pos
<i>Postal code</i> | : 78113 |
| 4. Status Penanaman Modal
<i>Investment Status</i> | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
<i>Domestic Direct Investment</i> |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
<i>Indonesia Standard Industrial Classification Code</i> | : 46206 - Perdagangan Besar Hasil
Perikanan
<i>46206 - Large Trade in Fishery Product</i> |
| 6. Lokasi Usaha
<i>Business Location</i> | : Jl. Kom Yos. Sudarso, Gg. Salak IV No. 8
Desa/Kelurahan Sungaijawi Luar, Kec.
Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi
Kalimantan Barat |
| Kode Pos
<i>Postal code</i> | : 78113 |

Telah memenuhi persyaratan berikut :

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS system is the business owner's responsibility.
2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSR-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the user's account.



The company name has met these requirements:

1. Perizinan Berusaha Subsektor Pengolahan Ikan dan/atau Pemasaran Ikan.
Business License for Fish Processing and/or Fish Marketing Subsector.
2. Sertifikat Pengolah Ikan atau sertifikat keterampilan.dibidang keamanan pangan yang setara bagi penanggung jawab mutu.
Fish Processing Certificate or Certificate of Skills in Food Safety Field Equal to Person in Charge of Quality Assurance.
3. Panduan mutu penerapan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan pemenuhan persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi.
Quality Guideline for The Good Manufacturing Practices of Fish Processing Implementation and Compliance The Requirement of Standard Operational Procedures of Hygiene.
4. Rekomendasi Kelayakan Pengolahan dari Pembina Mutu di Daerah.
Processing Feasibility Recommendations from Regional Quality Supervisors.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

This Business License to Support Business Activities attachment contains technical data inseparable from the document. The company name above must operate the business according to the prevailing laws and regulations.

Diterbitkan tanggal : 11 Maret 2025
Issued date : 11 March 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi /
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,
*p.p. Ministry of Marine Affairs and Fisheries
Ministry of Investment and Downstreaming /
Chairman of Indonesia Investment
Coordinating Board*



Ditandatangani secara elektronik
Electronic signature

Dicetak tanggal : 12 Maret 2025
Printed date : 12 March 2025

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS system is the business owner's responsibility.
2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSrE-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the user's account.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
BUSINESS LICENSE SUPPORTING BUSINESS ACTIVITIES

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN
CERTIFICATE OF GOOD MANUFACTURING PRACTICES

LAMPIRAN
ATTACHMENT

PBUMKU: 812001113016800060003

1. Nomor Seri
Serial Number : P.: 00038121
2. Nomor SKP
GMP Certificate Number : 36053/61/SKP/BK/III/2025
3. Nama Unit Pengolahan Ikan
Name of Fish Processing Plant : CV. JAYA KOTA
4. Jenis Produk
Type of Product(s) : Ikan Demersal Beku (Manyung, Kuwe, Biji Nangka, Anggoli, Bawal, Talang-talang, Kakap, Ayam-ayam, Pari, Kurisi)
: *Frozen Demersal Fish (Giant Catfish, Giant Trevally, Goatfish, Goldbanded Jobfish, Pomfret, Queenfish, Snapper, Starry Triggerfish, Stingray, Treadfin Bream)*
5. Tahapan Pengolahan
Processing Steps : Penerimaan, Penanganan, Pembekuan,
: *Pengemasan/Pelabelan, Penyimpanan Beku, Pemuatan*
: *Receiving, Handling, Freezing, Packing/Labelling, Cold Storing, Stuffing*
6. Peringkat
Ranking : C

Sertifikat ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan tetap memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene, atau kurang dari dua tahun apabila terjadi pelanggaran keamanan pangan

This certificate is valid for 2 (two) years and met the sanitation and hygiene requirement or less than two years in case of food safety violations

Dikeluarkan di
Issued in : Jakarta

Tanggal
Date : 11 Maret 2025
11 March 2025

Berlaku sampai dengan
Valid until : 11 Maret 2027
11 March 2027

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS system is the business owner's responsibility.
2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSR-E-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the user's account.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN (SKP)

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
BUSINESS LICENSE TO SUPPORT BUSINESS ACTIVITIES

PB-UMKU:812001113016800060002

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) kepada Pelaku Usaha berikut ini:

The Government of the Republic of Indonesia has accepted and issued the Business License to Support Business Activities, to the company named below:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha
<i>Company Name</i> | : CV JAYA KOTA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
<i>Business Registration Number</i> | : 8120011130168 |
| 3. Alamat Kantor
<i>Office Address</i> | : Jl. Kom Yos Sudarso, Gg. Salak IV No 8,
Desa/Kelurahan Sungaijawi Luar, Kec.
Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi
Kalimantan Barat |
| Kode Pos
<i>Postal code</i> | : 78113 |
| 4. Status Penanaman Modal
<i>Investment Status</i> | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
<i>Domestic Direct Investment</i> |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
<i>Indonesia Standard Industrial Classification Code</i> | : 46206 - Perdagangan Besar Hasil
Perikanan
<i>46206 - Large Trade in Fishery Product</i> |
| 6. Lokasi Usaha
<i>Business Location</i> | : Jl. Kom Yos. Sudarso, Gg. Salak IV No. 8
Desa/Kelurahan Sungaijawi Luar, Kec.
Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi
Kalimantan Barat |
| Kode Pos
<i>Postal code</i> | : 78113 |

Telah memenuhi persyaratan berikut :

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS system is the business owner's responsibility.
2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSR-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the user's account.



The company name has met these requirements:

1. Perizinan Berusaha Subsektor Pengolahan Ikan dan/atau Pemasaran Ikan.
Business License for Fish Processing and/or Fish Marketing Subsector.
2. Sertifikat Pengolah Ikan atau sertifikat keterampilan.dibidang keamanan pangan yang setara bagi penanggung jawab mutu.
Fish Processing Certificate or Certificate of Skills in Food Safety Field Equal to Person in Charge of Quality Assurance.
3. Panduan mutu penerapan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan pemenuhan persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi.
Quality Guideline for The Good Manufacturing Practices of Fish Processing Implementation and Compliance The Requirement of Standard Operational Procedures of Hygiene.
4. Rekomendasi Kelayakan Pengolahan dari Pembina Mutu di Daerah.
Processing Feasibility Recommendations from Regional Quality Supervisors.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

This Business License to Support Business Activities attachment contains technical data inseparable from the document. The company name above must operate the business according to the prevailing laws and regulations.

Diterbitkan tanggal : 11 Maret 2025
Issued date : 11 March 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi /
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,
*p.p. Ministry of Marine Affairs and Fisheries
Ministry of Investment and Downstreaming /
Chairman of Indonesia Investment
Coordinating Board*



Ditandatangani secara elektronik
Electronic signature

Dicetak tanggal : 12 Maret 2025
Printed date : 12 March 2025

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS system is the business owner's responsibility.
2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSrE-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the user's account.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
BUSINESS LICENSE SUPPORTING BUSINESS ACTIVITIES

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN
CERTIFICATE OF GOOD MANUFACTURING PRACTICES

LAMPIRAN
ATTACHMENT

PBUMKU: 812001113016800060002

1. Nomor Seri
Serial Number : P.: 00038120
2. Nomor SKP
GMP Certificate Number : 36052/61/SKP/BK/III/2025
3. Nama Unit Pengolahan Ikan
Name of Fish Processing Plant : CV. JAYA KOTA
4. Jenis Produk
Type of Product(s) : Ikan Pelagis Beku (Lemuru, Tongkol, Tembang, Kembung, Selar, Layang, Tenggiri)
: *Frozen Pelagic Fish (Bali Sardinella, Bullet Tuna, Goldstripe Sardinella, Indian Mackerel, Scad, Shortfin Scad, Spanish Mackerel)*
5. Tahapan Pengolahan
Processing Steps : Penerimaan, Penanganan, Pembekuan,
: *Pengemasan/Pelabelan, Penyimpanan Beku, Pemuatan*
: *Receiving, Handling, Freezing, Packing/Labelling, Cold Storing, Stuffing*
6. Peringkat
Ranking : C

Sertifikat ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan tetap memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene, atau kurang dari dua tahun apabila terjadi pelanggaran keamanan pangan

This certificate is valid for 2 (two) years and met the sanitation and hygiene requirement or less than two years in case of food safety violations

Dikeluarkan di
Issued in : Jakarta

Tanggal
Date : 11 Maret 2025
11 March 2025

Berlaku sampai dengan
Valid until : 11 Maret 2027
11 March 2027

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS system is the business owner's responsibility.
2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSR-E-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the user's account.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN (SKP)

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
BUSINESS LICENSE TO SUPPORT BUSINESS ACTIVITIES

PB-UMKU:022000269204400000005

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) kepada Pelaku Usaha berikut ini:

The Government of the Republic of Indonesia has accepted and issued the Business License to Support Business Activities, to the company named below:

1. Nama Pelaku Usaha <i>Company Name</i>	: CV JESSLYN INDAH LESTARI
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) <i>Business Registration Number</i>	: 0220002692044
3. Alamat Kantor <i>Office Address</i>	: Dusun Nirwana, Desa/Kelurahan Sungai Kakap, Kec. Sungai Kakap, Kab. Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat
Kode Pos <i>Postal code</i>	: 78381
4. Status Penanaman Modal <i>Investment Status</i>	: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) <i>Domestic Direct Investment</i>
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) <i>Indonesia Standard Industrial Classification Code</i>	: 46206 - Perdagangan Besar Hasil Perikanan <i>46206 - Large Trade in Fishery Product</i>
6. Lokasi Usaha <i>Business Location</i>	: Jl. Sungai Kakap Desa/Kelurahan Sungai Kakap, Kec. Sungai Kakap, Kab. Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat
Kode Pos <i>Postal code</i>	: 78381

Telah memenuhi persyaratan berikut :

The company name has met these requirements:

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS system is the business owner's responsibility.
2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSR-E-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the user's account.



1. Perizinan Berusaha Subsektor Pengolahan Ikan dan/atau Pemasaran Ikan.
Business License for Fish Processing and/or Fish Marketing Subsector.
2. Sertifikat Pengolah Ikan atau sertifikat keterampilan.dibidang keamanan pangan yang setara bagi penanggung jawab mutu.
Fish Processing Certificate or Certificate of Skills in Food Safety Field Equal to Person in Charge of Quality Assurance.
3. Panduan mutu penerapan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan pemenuhan persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi.
Quality Guideline for The Good Manufacturing Practices of Fish Processing Implementation and Compliance The Requirement of Standard Operational Procedures of Hygiene.
4. Rekomendasi Kelayakan Pengolahan dari Pembina Mutu di Daerah.
Processing Feasibility Recommendations from Regional Quality Supervisors.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

This Business License to Support Business Activities attachment contains technical data inseparable from the document. The company name above must operate the business according to the prevailing laws and regulations.

Diterbitkan tanggal : 19 Februari 2025
Issued date : 19 February 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi /
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,
*p.p. Ministry of Marine Affairs and Fisheries
Ministry of Investment and Downstreaming /
Chairman of Indonesia Investment
Coordinating Board*



Ditandatangani secara elektronik
Electronic signature

Dicetak tanggal : 25 Februari 2025
Printed date : 25 February 2025

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS system is the business owner's responsibility.
2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSR-E-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the user's account.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
BUSINESS LICENSE SUPPORTING BUSINESS ACTIVITIES

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN
CERTIFICATE OF GOOD MANUFACTURING PRACTICES

LAMPIRAN
ATTACHMENT

PBUMKU: 022000269204400000005

1. Nomor Seri
Serial Number : P.: 00037773
2. Nomor SKP
GMP Certificate Number : 35705/61/SKP/SG/II/2025
3. Nama Unit Pengolahan Ikan
Name of Fish Processing Plant : CV. JESSLYN INDAH LESTARI
4. Jenis Produk
Type of Product(s) : Cephalopoda Segar (Sotong, Cumi-cumi)
Fresh Cephalopods (Cuttlefish, Squid)
5. Tahapan Pengolahan
Processing Steps : Penerimaan, Penanganan, Pengemasan/Pelabelan, Pemuatan
Receiving, Handling, Packing/Labelling, Stuffing
6. Peringkat
Ranking : C

Sertifikat ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan tetap memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene, atau kurang dari dua tahun apabila terjadi pelanggaran keamanan pangan

This certificate is valid for 2 (two) years and met the sanitation and hygiene requirement or less than two years in case of food safety violations

Dikeluarkan di
Issued in : Jakarta

Tanggal
Date : 19 Februari 2025
19 February 2025

Berlaku sampai dengan
Valid until : 19 Februari 2027
19 February 2027

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS system is the business owner's responsibility.
2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSR-E-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the user's account.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN (SKP)

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
BUSINESS LICENSE TO SUPPORT BUSINESS ACTIVITIES

PB-UMKU:022000269204400000002

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) kepada Pelaku Usaha berikut ini:

The Government of the Republic of Indonesia has accepted and issued the Business License to Support Business Activities, to the company named below:

1. Nama Pelaku Usaha <i>Company Name</i>	: CV JESSLYN INDAH LESTARI
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) <i>Business Registration Number</i>	: 0220002692044
3. Alamat Kantor <i>Office Address</i>	: Dusun Nirwana, Desa/Kelurahan Sungai Kakap, Kec. Sungai Kakap, Kab. Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat
Kode Pos <i>Postal code</i>	: 78381
4. Status Penanaman Modal <i>Investment Status</i>	: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) <i>Domestic Direct Investment</i>
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) <i>Indonesia Standard Industrial Classification Code</i>	: 46206 - Perdagangan Besar Hasil Perikanan <i>46206 - Large Trade in Fishery Product</i>
6. Lokasi Usaha <i>Business Location</i>	: Jl. Sungai Kakap Desa/Kelurahan Sungai Kakap, Kec. Sungai Kakap, Kab. Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat
Kode Pos <i>Postal code</i>	: 78381

Telah memenuhi persyaratan berikut :

The company name has met these requirements:

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS system is the business owner's responsibility.
2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSR-E-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the user's account.



1. Perizinan Berusaha Subsektor Pengolahan Ikan dan/atau Pemasaran Ikan.
Business License for Fish Processing and/or Fish Marketing Subsector.
2. Sertifikat Pengolah Ikan atau sertifikat keterampilan.dibidang keamanan pangan yang setara bagi penanggung jawab mutu.
Fish Processing Certificate or Certificate of Skills in Food Safety Field Equal to Person in Charge of Quality Assurance.
3. Panduan mutu penerapan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan pemenuhan persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi.
Quality Guideline for The Good Manufacturing Practices of Fish Processing Implementation and Compliance The Requirement of Standard Operational Procedures of Hygiene.
4. Rekomendasi Kelayakan Pengolahan dari Pembina Mutu di Daerah.
Processing Feasibility Recommendations from Regional Quality Supervisors.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

This Business License to Support Business Activities attachment contains technical data inseparable from the document. The company name above must operate the business according to the prevailing laws and regulations.

Diterbitkan tanggal : 19 Februari 2025
Issued date : 19 February 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi /
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,
*p.p. Ministry of Marine Affairs and Fisheries
Ministry of Investment and Downstreaming /
Chairman of Indonesia Investment
Coordinating Board*



Ditandatangani secara elektronik
Electronic signature

Dicetak tanggal : 25 Februari 2025
Printed date : 25 February 2025

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS system is the business owner's responsibility.
2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSR-E-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the user's account.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
BUSINESS LICENSE SUPPORTING BUSINESS ACTIVITIES

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN
CERTIFICATE OF GOOD MANUFACTURING PRACTICES

LAMPIRAN
ATTACHMENT

PBUMKU: 022000269204400000002

1. Nomor Seri
Serial Number : P.: 00037774
2. Nomor SKP
GMP Certificate Number : 35706/61/SKP/SG/II/2025
3. Nama Unit Pengolahan Ikan
Name of Fish Processing Plant : CV. JESSLYN INDAH LESTARI
4. Jenis Produk
Type of Product(s) : Ikan Demersal Segar (Senangin, Manyung, Kerapu, Bawal, Kakap, Kurau, Barramundi)
Fresh Demersal Fish (Fourfinger Threadfin, Giant Catfish, Grouper, Pomfret, Snapper, Threadfin, Barramundi)
5. Tahapan Pengolahan
Processing Steps : Penerimaan, Penanganan, Pengemasan/Pelabelan, Pemuatan
Receiving, Handling, Packing/Labelling, Stuffing
6. Peringkat
Ranking : C

Sertifikat ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan tetap memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene, atau kurang dari dua tahun apabila terjadi pelanggaran keamanan pangan

This certificate is valid for 2 (two) years and met the sanitation and hygiene requirement or less than two years in case of food safety violations

Dikeluarkan di
Issued in : Jakarta

Tanggal
Date : 19 Februari 2025
19 February 2025

Berlaku sampai dengan
Valid until : 19 Februari 2027
19 February 2027

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS system is the business owner's responsibility.
2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSR-E-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the user's account.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN (SKP)

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
BUSINESS LICENSE TO SUPPORT BUSINESS ACTIVITIES

PB-UMKU:022000269204400000003

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) kepada Pelaku Usaha berikut ini:

The Government of the Republic of Indonesia has accepted and issued the Business License to Support Business Activities, to the company named below:

1. Nama Pelaku Usaha <i>Company Name</i>	: CV JESSLYN INDAH LESTARI
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) <i>Business Registration Number</i>	: 0220002692044
3. Alamat Kantor <i>Office Address</i>	: Dusun Nirwana, Desa/Kelurahan Sungai Kakap, Kec. Sungai Kakap, Kab. Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat
Kode Pos <i>Postal code</i>	: 78381
4. Status Penanaman Modal <i>Investment Status</i>	: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) <i>Domestic Direct Investment</i>
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) <i>Indonesia Standard Industrial Classification Code</i>	: 46206 - Perdagangan Besar Hasil Perikanan <i>46206 - Large Trade in Fishery Product</i>
6. Lokasi Usaha <i>Business Location</i>	: Jl. Sungai Kakap Desa/Kelurahan Sungai Kakap, Kec. Sungai Kakap, Kab. Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat
Kode Pos <i>Postal code</i>	: 78381

Telah memenuhi persyaratan berikut :

The company name has met these requirements:

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS system is the business owner's responsibility.
2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSR-E-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the user's account.



1. Perizinan Berusaha Subsektor Pengolahan Ikan dan/atau Pemasaran Ikan.
Business License for Fish Processing and/or Fish Marketing Subsector.
2. Sertifikat Pengolah Ikan atau sertifikat keterampilan.dibidang keamanan pangan yang setara bagi penanggung jawab mutu.
Fish Processing Certificate or Certificate of Skills in Food Safety Field Equal to Person in Charge of Quality Assurance.
3. Panduan mutu penerapan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan pemenuhan persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi.
Quality Guideline for The Good Manufacturing Practices of Fish Processing Implementation and Compliance The Requirement of Standard Operational Procedures of Hygiene.
4. Rekomendasi Kelayakan Pengolahan dari Pembina Mutu di Daerah.
Processing Feasibility Recommendations from Regional Quality Supervisors.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

This Business License to Support Business Activities attachment contains technical data inseparable from the document. The company name above must operate the business according to the prevailing laws and regulations.

Diterbitkan tanggal : 19 Februari 2025
Issued date : 19 February 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi /
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,
*p.p. Ministry of Marine Affairs and Fisheries
Ministry of Investment and Downstreaming /
Chairman of Indonesia Investment
Coordinating Board*



Ditandatangani secara elektronik
Electronic signature

Dicetak tanggal : 25 Februari 2025
Printed date : 25 February 2025

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS system is the business owner's responsibility.
2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSR-E-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the user's account.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
BUSINESS LICENSE SUPPORTING BUSINESS ACTIVITIES

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN
CERTIFICATE OF GOOD MANUFACTURING PRACTICES

LAMPIRAN
ATTACHMENT

PBUMKU: 022000269204400000003

1. Nomor Seri
Serial Number : P.: 00037775
2. Nomor SKP
GMP Certificate Number : 35707/61/SKP/SG/II/2025
3. Nama Unit Pengolahan Ikan
Name of Fish Processing Plant : CV. JESSLYN INDAH LESTARI
4. Jenis Produk
Type of Product(s) : Ikan Pelagis Segar (Tenggiri, Puput)
Fresh Pelagic Fish (Spanish Mackerel, *Ilisha Elongata*)
5. Tahapan Pengolahan
Processing Steps : Penerimaan, Penanganan, Pengemasan/Pelabelan, Pemuatan
Receiving, Handling, Packing/Labelling, Stuffing
6. Peringkat
Ranking : C

Sertifikat ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan tetap memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene, atau kurang dari dua tahun apabila terjadi pelanggaran keamanan pangan

This certificate is valid for 2 (two) years and met the sanitation and hygiene requirement or less than two years in case of food safety violations

Dikeluarkan di
Issued in : Jakarta

Tanggal
Date : 19 Februari 2025
19 February 2025

Berlaku sampai dengan
Valid until : 19 Februari 2027
19 February 2027

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS system is the business owner's responsibility.
2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSR-E-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the user's account.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN (SKP)

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
BUSINESS LICENSE TO SUPPORT BUSINESS ACTIVITIES

PB-UMKU:022000269204400000001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) kepada Pelaku Usaha berikut ini:

The Government of the Republic of Indonesia has accepted and issued the Business License to Support Business Activities, to the company named below:

1. Nama Pelaku Usaha <i>Company Name</i>	: CV JESSLYN INDAH LESTARI
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) <i>Business Registration Number</i>	: 0220002692044
3. Alamat Kantor <i>Office Address</i>	: Dusun Nirwana, Desa/Kelurahan Sungai Kakap, Kec. Sungai Kakap, Kab. Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat
Kode Pos <i>Postal code</i>	: 78381
4. Status Penanaman Modal <i>Investment Status</i>	: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) <i>Domestic Direct Investment</i>
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) <i>Indonesia Standard Industrial Classification Code</i>	: 46206 - Perdagangan Besar Hasil Perikanan <i>46206 - Large Trade in Fishery Product</i>
6. Lokasi Usaha <i>Business Location</i>	: Jl. Sungai Kakap Desa/Kelurahan Sungai Kakap, Kec. Sungai Kakap, Kab. Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat
Kode Pos <i>Postal code</i>	: 78381

Telah memenuhi persyaratan berikut :

The company name has met these requirements:

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS system is the business owner's responsibility.
2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSR-E-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the user's account.



1. Perizinan Berusaha Subsektor Pengolahan Ikan dan/atau Pemasaran Ikan.
Business License for Fish Processing and/or Fish Marketing Subsector.
2. Sertifikat Pengolah Ikan atau sertifikat keterampilan.dibidang keamanan pangan yang setara bagi penanggung jawab mutu.
Fish Processing Certificate or Certificate of Skills in Food Safety Field Equal to Person in Charge of Quality Assurance.
3. Panduan mutu penerapan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan pemenuhan persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi.
Quality Guideline for The Good Manufacturing Practices of Fish Processing Implementation and Compliance The Requirement of Standard Operational Procedures of Hygiene.
4. Rekomendasi Kelayakan Pengolahan dari Pembina Mutu di Daerah.
Processing Feasibility Recommendations from Regional Quality Supervisors.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

This Business License to Support Business Activities attachment contains technical data inseparable from the document. The company name above must operate the business according to the prevailing laws and regulations.

Diterbitkan tanggal : 19 Februari 2025
Issued date : 19 February 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi /
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,
*p.p. Ministry of Marine Affairs and Fisheries
Ministry of Investment and Downstreaming /
Chairman of Indonesia Investment
Coordinating Board*



Ditandatangani secara elektronik
Electronic signature

Dicetak tanggal : 20 Februari 2025
Printed date : 20 February 2025

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS system is the business owner's responsibility.
2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSR-E-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the user's account.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
BUSINESS LICENSE SUPPORTING BUSINESS ACTIVITIES

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN
CERTIFICATE OF GOOD MANUFACTURING PRACTICES

LAMPIRAN
ATTACHMENT

PBUMKU: 022000269204400000001

1. Nomor Seri
Serial Number : P.: 00037768
2. Nomor SKP
GMP Certificate Number : 35700/61/SKP/SG/II/2025
3. Nama Unit Pengolahan Ikan
Name of Fish Processing Plant : CV. JESSLYN INDAH LESTARI
4. Jenis Produk
Type of Product(s) : Udang Segar
Fresh Shrimp
5. Tahapan Pengolahan
Processing Steps : Penerimaan, Penanganan, Pengemasan/Pelabelan, Pemuatan
Receiving, Handling, Packing/Labelling, Stuffing
6. Peringkat
Ranking : C

Sertifikat ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan tetap memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene, atau kurang dari dua tahun apabila terjadi pelanggaran keamanan pangan

This certificate is valid for 2 (two) years and met the sanitation and hygiene requirement or less than two years in case of food safety violations

Dikeluarkan di
Issued in : Jakarta

Tanggal
Date : 19 Februari 2025
19 February 2025

Berlaku sampai dengan
Valid until : 19 Februari 2027
19 February 2027

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS system is the business owner's responsibility.
2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSR-E-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the user's account.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN (SKP)

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
BUSINESS LICENSE TO SUPPORT BUSINESS ACTIVITIES

PB-UMKU:022000269204400000004

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) kepada Pelaku Usaha berikut ini:

The Government of the Republic of Indonesia has accepted and issued the Business License to Support Business Activities, to the company named below:

1. Nama Pelaku Usaha <i>Company Name</i>	: CV JESSLYN INDAH LESTARI
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) <i>Business Registration Number</i>	: 0220002692044
3. Alamat Kantor <i>Office Address</i>	: Dusun Nirwana, Desa/Kelurahan Sungai Kakap, Kec. Sungai Kakap, Kab. Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat
Kode Pos <i>Postal code</i>	: 78381
4. Status Penanaman Modal <i>Investment Status</i>	: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) <i>Domestic Direct Investment</i>
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) <i>Indonesia Standard Industrial Classification Code</i>	: 46206 - Perdagangan Besar Hasil Perikanan <i>46206 - Large Trade in Fishery Product</i>
6. Lokasi Usaha <i>Business Location</i>	: Jl. Sungai Kakap Desa/Kelurahan Sungai Kakap, Kec. Sungai Kakap, Kab. Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat
Kode Pos <i>Postal code</i>	: 78381

Telah memenuhi persyaratan berikut :

The company name has met these requirements:

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS system is the business owner's responsibility.
2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSR-E-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the user's account.



1. Perizinan Berusaha Subsektor Pengolahan Ikan dan/atau Pemasaran Ikan.
Business License for Fish Processing and/or Fish Marketing Subsector.
2. Sertifikat Pengolah Ikan atau sertifikat keterampilan.dibidang keamanan pangan yang setara bagi penanggung jawab mutu.
Fish Processing Certificate or Certificate of Skills in Food Safety Field Equal to Person in Charge of Quality Assurance.
3. Panduan mutu penerapan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan pemenuhan persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi.
Quality Guideline for The Good Manufacturing Practices of Fish Processing Implementation and Compliance The Requirement of Standard Operational Procedures of Hygiene.
4. Rekomendasi Kelayakan Pengolahan dari Pembina Mutu di Daerah.
Processing Feasibility Recommendations from Regional Quality Supervisors.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

This Business License to Support Business Activities attachment contains technical data inseparable from the document. The company name above must operate the business according to the prevailing laws and regulations.

Diterbitkan tanggal : 19 Februari 2025
Issued date : 19 February 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi /
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,
*p.p. Ministry of Marine Affairs and Fisheries
Ministry of Investment and Downstreaming /
Chairman of Indonesia Investment
Coordinating Board*



Ditandatangani secara elektronik
Electronic signature

Dicetak tanggal : 20 Februari 2025
Printed date : 20 February 2025

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS system is the business owner's responsibility.
2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSR-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the user's account.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
BUSINESS LICENSE SUPPORTING BUSINESS ACTIVITIES

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN
CERTIFICATE OF GOOD MANUFACTURING PRACTICES

LAMPIRAN
ATTACHMENT

PBUMKU: 022000269204400000004

1. Nomor Seri
Serial Number : P.: 00037769
2. Nomor SKP
GMP Certificate Number : 35701/61/SKP/SG/II/2025
3. Nama Unit Pengolahan Ikan
Name of Fish Processing Plant : CV. JESSLYN INDAH LESTARI
4. Jenis Produk
Type of Product(s) : Rajungan Segar
Fresh Swimming Crab
5. Tahapan Pengolahan
Processing Steps : Penerimaan, Penanganan, Pengemasan/Pelabelan, Pemuatan
Receiving, Handling, Packing/Labelling, Stuffing
6. Peringkat
Ranking : C

Sertifikat ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan tetap memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene, atau kurang dari dua tahun apabila terjadi pelanggaran keamanan pangan

This certificate is valid for 2 (two) years and met the sanitation and hygiene requirement or less than two years in case of food safety violations

Dikeluarkan di
Issued in : Jakarta

Tanggal
Date : 19 Februari 2025
19 February 2025

Berlaku sampai dengan
Valid until : 19 Februari 2027
19 February 2027

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS system is the business owner's responsibility.
2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSR-E-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the user's account.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN (SKP)

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
BUSINESS LICENSE TO SUPPORT BUSINESS ACTIVITIES

PB-UMKU:091022002141600010001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) kepada Pelaku Usaha berikut ini:

The Government of the Republic of Indonesia has accepted and issued the Business License to Support Business Activities, to the company named below:

1. Nama Pelaku Usaha <i>Company Name</i>	: CV SUKSES BINTANG PALOH
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) <i>Business Registration Number</i>	: 0910220021416
3. Alamat Kantor <i>Office Address</i>	: Dusun Serumpun, Desa/Kelurahan Sebubus, Kec. Paloh, Kab. Sambas, Provinsi Kalimantan Barat
Kode Pos <i>Postal code</i>	: 79466
4. Status Penanaman Modal <i>Investment Status</i>	: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) <i>Domestic Direct Investment</i>
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) <i>Indonesia Standard Industrial Classification Code</i>	: 10291 - Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya <i>10291 - Salted/Dried Aquatic Biota Industry</i>
6. Lokasi Usaha <i>Business Location</i>	: DUSUN SERUMPUN, RT.004/RW.021 Desa/Kelurahan Sebubus, Kec. Paloh, Kab. Sambas, Provinsi Kalimantan Barat
Kode Pos <i>Postal code</i>	: 79466

Telah memenuhi persyaratan berikut :

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS system is the business owner's responsibility.
2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSrE-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the user's account.



The company name has met these requirements:

1. Perizinan Berusaha Subsektor Pengolahan Ikan dan/atau Pemasaran Ikan.
Business License for Fish Processing and/or Fish Marketing Subsector.
2. Sertifikat Pengolah Ikan atau sertifikat keterampilan.dibidang keamanan pangan yang setara bagi penanggung jawab mutu.
Fish Processing Certificate or Certificate of Skills in Food Safety Field Equal to Person in Charge of Quality Assurance.
3. Panduan mutu penerapan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan pemenuhan persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi.
Quality Guideline for The Good Manufacturing Practices of Fish Processing Implementation and Compliance The Requirement of Standard Operational Procedures of Hygiene.
4. Rekomendasi Kelayakan Pengolahan dari Pembina Mutu di Daerah.
Processing Feasibility Recommendations from Regional Quality Supervisors.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

This Business License to Support Business Activities attachment contains technical data inseparable from the document. The company name above must operate the business according to the prevailing laws and regulations.

Diterbitkan tanggal : 05 Maret 2025
Issued date : 05 March 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi /
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,
*p.p. Ministry of Marine Affairs and Fisheries
Ministry of Investment and Downstreaming /
Chairman of Indonesia Investment
Coordinating Board*



Ditandatangani secara elektronik
Electronic signature

Dicetak tanggal : 07 Maret 2025
Printed date : 07 March 2025

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS system is the business owner's responsibility.
2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSrE-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the user's account.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
BUSINESS LICENSE SUPPORTING BUSINESS ACTIVITIES

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN
CERTIFICATE OF GOOD MANUFACTURING PRACTICES

LAMPIRAN
ATTACHMENT

PBUMKU: 091022002141600010001

1. Nomor Seri
Serial Number : P.: 00038002
2. Nomor SKP
GMP Certificate Number : 35934/61/SKP/KR/III/2025
3. Nama Unit Pengolahan Ikan
Name of Fish Processing Plant : CV. SUKSES BINTANG PALOH
4. Jenis Produk
Type of Product(s) : Ubur-ubur Asin
Salted Jellyfish
5. Tahapan Pengolahan
Processing Steps : Penerimaan, Penanganan, Penggaraman,
Pengemasan/Pelabelan, Penyimpanan, Pemuatan
Receiving, Handling, Salting, Packing/Labelling,
Storing, Stuffing
6. Peringkat
Ranking : C

Sertifikat ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan tetap memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene, atau kurang dari dua tahun apabila terjadi pelanggaran keamanan pangan

This certificate is valid for 2 (two) years and met the sanitation and hygiene requirement or less than two years in case of food safety violations

Dikeluarkan di
Issued in : Jakarta

Tanggal
Date : 05 Maret 2025
05 March 2025

Berlaku sampai dengan
Valid until : 05 Maret 2027
05 March 2027

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS system is the business owner's responsibility.
2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSR-E-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the user's account.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

REKAPITULASI DATA SERTIFIKASI MUTU KELAUTAN HASIL PERIKANAN (SMKHP) EKSPOR
UPT STASIUN KIPM PONTIANAK

Laporan Bulan / Tahun : Januari 2025

Nama UPT KIPM : Pontianak

No.	Nama Perusahaan	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ekspor			Jenis Produk	Nama Latin / Spesies	Asal Bahan Baku	Negara Tujuan	Pelabuhan Keluar	Pelabuhan Masuk	Volume (Kg)	Nilai USD (\$)	HS Code	PNBP
		No. Sertifikat	No. Seri	Tanggal Penerbitan										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	CV. JESSLYN INDAH LESTARI	000001	H 001391	01-Jan-25	Udang Wangkang	<i>Penaeus orientalis</i>	TANGKAP	Malaysia	Entikong	Kuching, Sarawak	450	5,607.41	03063639	0.00
					Ikan Tenggiri	<i>S. commersoni</i>	TANGKAP	Malaysia	Entikong	Kuching, Sarawak	1275		03028919	
					Udang Dogol	<i>Penaeus merguensis</i>	TANGKAP	Malaysia	Entikong	Kuching, Sarawak	225		03063639	
					Ikan Gulama	<i>Nibea albiflora</i>	TANGKAP	Malaysia	Entikong	Kuching, Sarawak	450		03028919	
					Ikan Bawal Putih	<i>Pampus argenteus</i>	TANGKAP	Malaysia	Entikong	Kuching, Sarawak	150		03035920	
2	CV. ROBBY JAYA	000002	H 001392	02-Jan-25	UDANG WANGKANG	<i>Penaeus orientalis</i>	TANGKAP	Malaysia	Jagoi Babang, Bengkayang	Sirikin, Sarawak	960	2,341.20	03063639	0.00
3	CV. JESSLYN INDAH LESTARI	000003	H 001393	03-Jan-25	Udang Wangkang	<i>Penaeus orientalis</i>	TANGKAP	Malaysia	Entikong	Kuching, Sarawak	450	2,270.39	03063639	0.00
					Ikan Tenggiri	<i>S. commersoni</i>	TANGKAP	Malaysia	Entikong	Kuching, Sarawak	75		03028919	
					Udang Dogol	<i>Penaeus merguensis</i>	TANGKAP	Malaysia	Entikong	Kuching, Sarawak	75		03063639	
					Ikan Gulama	<i>Nibea albiflora</i>	TANGKAP	Malaysia	Entikong	Kuching, Sarawak	225		03028919	
					Ikan Bawal Putih	<i>Pampus argenteus</i>	TANGKAP	Malaysia	Entikong	Kuching, Sarawak	75		03035920	
4	CV. ROBBY JAYA	000004	H 001394	06-Jan-25	UDANG WANGKANG	<i>Penaeus orientalis</i>	TANGKAP	Malaysia	Jagoi Babang, Bengkayang	Sirikin, Sarawak	720	1,749.41	03063639	0.00
5	CV. JESSLYN INDAH LESTARI	000005	H 001395	07-Jan-25	Udang Wangkang	<i>Penaeus orientalis</i>	TANGKAP	Malaysia	Entikong	Kuching, Sarawak	525	1,596.87	03063639	0.00
6	CV. ROBBY JAYA	000006	H 001396	08-Jan-25	UDANG WANGKANG	<i>Penaeus orientalis</i>	TANGKAP	Malaysia	Jagoi Babang, Bengkayang	Sirikin, Sarawak	720	1,754.61	03063639	0.00
7	CV. JESSLYN INDAH LESTARI	000007	H 001397	10-Jan-25	Udang Wangkang	<i>Penaeus orientalis</i>	TANGKAP	Malaysia	Entikong	Kuching, Sarawak	525	2,350.76	03063639	0.00
					Ikan Tenggiri	<i>S. commersoni</i>	TANGKAP	Malaysia	Entikong	Kuching, Sarawak	375		03028919	
8	CV. ROBBY JAYA	000008	H 001398	10-Jan-25	UDANG WANGKANG	<i>Penaeus orientalis</i>	TANGKAP	Malaysia	Jagoi Babang, Bengkayang	Sirikin, Sarawak	720	1,751.14	03063639	0.00
9	CV. ROBBY JAYA	000009	H 001399	12-Jan-25	UDANG WANGKANG	<i>Penaeus orientalis</i>	TANGKAP	Malaysia	Jagoi Babang, Bengkayang	Sirikin, Sarawak	800	1,941.27	03063639	0.00
10	CV. ROBBY JAYA	000010	H 001400	14-Jan-25	UDANG WANGKANG	<i>Penaeus orientalis</i>	TANGKAP	Malaysia	Jagoi Babang, Bengkayang	Sirikin, Sarawak	800	1,936.15	03063639	0.00
11	CV. ROBBY JAYA	000011	H 004001	16-Jan-25	UDANG WANGKANG	<i>Penaeus orientalis</i>	TANGKAP	Malaysia	Jagoi Babang, Bengkayang	Sirikin, Sarawak	1200	2,898.87	03063639	0.00

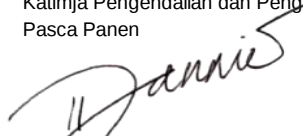
12	CV. JESSLYN INDAH LESTARI	000012	H 004002	16-Jan-25	Udang Wangkang	<i>Penaeus orientalis</i>	TANGKAP	Malaysia	Entikong	Kuching, Sarawak	375	2,904.22	03063639	0.00
					Udang Dogol	<i>Penaeus merguensis</i>	TANGKAP	Malaysia	Entikong	Kuching, Sarawak	75		03063639	
					Ikan Gulama	<i>Nibea albiflora</i>	TANGKAP	Malaysia	Entikong	Kuching, Sarawak	225		03028919	
					Ikan Kakap Merah	<i>Lutjanus sp.</i>	TANGKAP	Malaysia	Entikong	Kuching, Sarawak	375		03028918	
					Ikan Kurau	<i>Eleotheronema tetradactylum</i>	TANGKAP	Malaysia	Entikong	Kuching, Sarawak	150		03028919	
13	CV. ROBBY JAYA	000013	H 004003	19-Jan-25	UDANG WANGKANG	<i>Penaeus orientalis</i>	TANGKAP	Malaysia	Jagoi Babang, Bengkayang	Sirikin, Sarawak	1280	3,079.48	03063639	0.00
14	CV. JESSLYN INDAH LESTARI	000014	H 004004	21-Jan-25	Udang Wangkang	<i>Penaeus orientalis</i>	TANGKAP	Malaysia	Entikong	Kuching, Sarawak	750	3,128.74	03063639	0.00
					Ikan Bawal Hitam	<i>Formio niger</i>	TANGKAP	Malaysia	Entikong	Kuching, Sarawak	225		03028917	
					Udang Dogol	<i>Penaeus merguensis</i>	TANGKAP	Malaysia	Entikong	Kuching, Sarawak	75		03063639	
					Ikan Gulama	<i>Nibea albiflora</i>	TANGKAP	Malaysia	Entikong	Kuching, Sarawak	150		03028919	
15	CV. ROBBY JAYA	000015	H 00405	22-Jan-25	UDANG WANGKANG	<i>Penaeus orientalis</i>	TANGKAP	Malaysia	Jagoi Babang, Bengkayang	Sirikin, Sarawak	960	2,310.46	03063639	0.00
16	PT. PULAUMAS KHATULISTIWA	1.0-00001-202	E 240002251	24-Jan-25	FROZEN PUD SHRIMPS (RED PUD BLOCK)	<i>METAPENAEUS ENSIS</i>	TANGKAP	Japan	Pontianak / Supadio (u)	Nagoya, Aichi	16200	81,923.22	03061790	25,000.00
					FROZEN PUD SHRIMPS (RED PUD IQF SOAKING)	<i>METAPENAEUS ENSIS</i>	TANGKAP	Japan	Pontianak / Supadio (u)	Nagoya, Aichi	1500		03061790	
17	CV. ROBBY JAYA	000016	H 004006	24-Jan-25	UDANG WANGKANG	<i>Penaeus orientalis</i>	TANGKAP	Malaysia	Sintete	Batu Lintang, Sarawak	800	2,743.71	03063639	0.00
					IKAN KAKAP MERAH	<i>Lutjanus argentimaculatus</i>	TANGKAP	Malaysia	Sintete	Batu Lintang, Sarawak	400		03028918	



Kepala SKIPM Pontianak,

Jimmy Elwaren, S.St.Pi
NIP. 197701242005021001

Mengetahui,
Katimja Pengendalian dan Pengawasan Mutu
Pasca Panen


Dannie Patria Ratin, A.Md., S.Pi
NIP. 197911302005021002

Pontianak, 10 Februari 2025

Operator,


Purnomo Putra, A.Md
NIP. 198703152014021003

**REKAP EKSPOR MUTU
STASIUN KIPM PONTIANAK TAHUN 2025**

NO.	NAMA UPI	PEMAKAIAN SERTIFIKAT/BULAN											
		JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEP	OKT	NOV	DES
1	PT. PULAUMAS KHATULISTIWA	1											
2	CV. JESSLYN INDAH LESTARI	6											
3	CV. ROBBY JAYA	10											
4	PERORANGAN TJHANG SE SU	-											
TOTAL		17											



Mengesahkan,
Kepala Stkipm Pontianak,

Jenny E. Elwaten, S.St.Pi
NIP. 197701242005021001

Mengetahui,
Katimja Pengendalian dan Pengawasan Mutu
Pasca Panen

Dannie Patria Ratin, A.Md., S.Pi
NIP. 197911302005021002

Pontianak, 10 Februari 2025

Operator,

Purnomo Putra, A.Md
NIP. 198703152014021003

REKAPITULASI DATA SERTIFIKASI MUTU KELAUTAN HASIL PERIKANAN (SMKHP) EKSPOR
UPT STASIUN KIPM PONTIANAK

Laporan Bulan / Tahun : Februari 2025
Nama UPT KIPM : Pontianak

No.	Nama Perusahaan	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ekspor			Jenis Produk	Nama Latin / Spesies	Asal Bahan Baku	Negara Tujuan	Pelabuhan Keluar	Pelabuhan Masuk	Volume (Kg)	Nilai USD (\$)	HS Code	PNBP
		No. Sertifikat	No. Seri	Tanggal Penerbitan										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	CV. JESSLYN INDAH LESTARI	000017	H 004008	03-Feb-25	Udang Wangkang	<i>Penaeus orientalis</i>	TANGKAP	Malaysia	Entikong	Kuching, Sarawak	1425	5,359.56	03063639	0.00
					Ikan Tenggiri	<i>S. commersoni</i>	TANGKAP	Malaysia	Entikong	Kuching, Sarawak	525		03028919	
2	CV. ROBBY JAYA	000018	H 004009	03-Feb-25	UDANG WANGKANG	<i>Penaeus orientalis</i>	TANGKAP	Malaysia	Jagoi Babang, Bengkayang	Sirikin, Sarawak	480	1,159.48	03063639	0.00
3	CV. JESSLYN INDAH LESTARI	000019	H 004010	05-Feb-25	Udang Wangkang	<i>Penaeus orientalis</i>	TANGKAP	Malaysia	Entikong	Kuching, Sarawak	525	5,793.68	03063639	0.00
					Ikan Tenggiri	<i>S. commersoni</i>	TANGKAP	Malaysia	Entikong	Kuching, Sarawak	1950		0302819	
					Ikan Bawal Hitam	<i>Formio niger</i>	TANGKAP	Malaysia	Entikong	Kuching, Sarawak	150		03028917	
4	CV. ROBBY JAYA	000020	H 004011	05-Feb-25	UDANG WANGKANG	<i>Penaeus orientalis</i>	TANGKAP	Malaysia	Jagoi Babang, Bengkayang	Sirikin, Sarawak	800	1,926.21	03063639	0.00
5	PT. PULAUMAS KHATULISTIWA	11.0-00002-2025	G 200001228	05-Feb-25	Frozen PUD SAND PINK SHRIMPS	<i>Metapenaeus ensis</i>	TANGKAP	Taiwan	Pontianak / Supadio (u)	Kaohsiung	19,760.00	61,277.86	03061790	25,000.00
6	CV. JESSLYN INDAH LESTARI	000021	H 004012	07-Feb-25	Ikan Tenggiri	<i>S. commersoni</i>	TANGKAP	Malaysia	Entikong	Kuching, Sarawak	825	2,262.11	0302819	0.00
					Ikan Bawal Hitam	<i>Formio niger</i>	TANGKAP	Malaysia	Entikong	Kuching, Sarawak	300		03028917	0.00
7	CV. ROBBY JAYA	000022	H 004013	07-Feb-25	UDANG WANGKANG	<i>Penaeus orientalis</i>	TANGKAP	Malaysia	Jagoi Babang, Bengkayang	Sirikin, Sarawak	880	2,123.36	03063639	0.00
8	CV. JESSLYN INDAH LESTARI	000023	H 004014	10-Feb-25	Udang Wangkang	<i>Penaeus orientalis</i>	TANGKAP	Malaysia	Entikong	Kuching, Sarawak	225	1,282.26	03063639	0.00
					Ikan Tenggiri	<i>S. commersoni</i>	TANGKAP	Malaysia	Entikong	Kuching, Sarawak	225		0302819	
					Ikan Bawal Hitam	<i>Formio niger</i>	TANGKAP	Malaysia	Entikong	Kuching, Sarawak	75		03028917	
9	CV. ROBBY JAYA	000024	H 004015	10-Feb-25	UDANG WANGKANG	<i>Penaeus orientalis</i>	TANGKAP	Malaysia	Jagoi Babang, Bengkayang	Sirikin, Sarawak	1440	3,475.67	03063639	0.00
10	PT. PULAUMAS KHATULISTIWA	000025	H 004016	14-Feb-25	Udang Putih	<i>Penaeus vannamei</i>	BUDIDAYA	Singapore	Pontianak / Supadio (u)	Singapore	20930	97,108.64	03061729	0.00
11	CV. JESSLYN INDAH LESTARI	000026	H 004017	14-Feb-25	Udang Wangkang	<i>Penaeus orientalis</i>	TANGKAP	Malaysia	Entikong	Kuching, Sarawak	825	2,633.49	03063639	0.00
					Ikan Bawal Hitam	<i>Formio niger</i>	TANGKAP	Malaysia	Entikong	Kuching, Sarawak	75		03028917	
12	CV. ROBBY JAYA	000027	H 004018	16-Feb-25	UDANG WANGKANG	<i>Penaeus orientalis</i>	TANGKAP	Malaysia	Jagoi Babang, Bengkayang	Sirikin, Sarawak	1440	3,467.18	03063639	0.00
13	CV. JESSLYN INDAH LESTARI	000028	H 004019	18-Feb-25	Udang Wangkang	<i>Penaeus orientalis</i>	TANGKAP	Malaysia	Entikong	Kuching, Sarawak	825	2,810.95	03063639	0.00
					Ikan Bawal Hitam	<i>Formio niger</i>	TANGKAP	Malaysia	Entikong	Kuching, Sarawak	150		03028917	
14	CV. ROBBY JAYA	000029	H 004021	20-Feb-25	UDANG WANGKANG	<i>Penaeus orientalis</i>	TANGKAP	Malaysia	Jagoi Babang, Bengkayang	Sirikin, Sarawak	2400	5,781.44	03063639	0.00
15	CV. JESSLYN INDAH LESTARI	000030	H 004020	20-Feb-25	Udang Wangkang	<i>Penaeus orientalis</i>	TANGKAP	Malaysia	Entikong	Kuching, Sarawak	1200	4,817.87	03063639	0.00
					Ikan Bawal Hitam	<i>Formio niger</i>	TANGKAP	Malaysia	Entikong	Kuching, Sarawak	75		03028917	
					Udang Dogol	<i>Penaeus merguensis</i>	TANGKAP	Malaysia	Entikong	Kuching, Sarawak	525		03063639	

16	PT. PULAUMAS KHATULISTIWA	000031	H 004022	21-Feb-25	Udang Putih	<i>Penaeus vannamei</i>	BUDIDAYA	Singapore	Pontianak / Supadio (u)	Singapore	21070	95,815.71	03061729	0.00
					Betutu	<i>Oxyeleotris marmorata</i>	BUDIDAYA	Singapore	Pontianak / Supadio (u)	Singapore	870		03038929	
17	CV. JESSLYN INDAH LESTARI	000032	H 004123	23-Feb-25	Udang Wangkang	<i>Penaeus orientalis</i>	TANGKAP	Malaysia	Entikong	Kuching, Sarawak	900	6,690.13	03063639	0.00
					Ikan Tenggiri	<i>S. commersoni</i>	TANGKAP	Malaysia	Entikong	Kuching, Sarawak	1425		03028919	
					Ikan Bawal Hitam	<i>Formio niger</i>	TANGKAP	Malaysia	Entikong	Kuching, Sarawak	150		03028917	
					Udang Dogol	<i>Penaeus merguensis</i>	TANGKAP	Malaysia	Entikong	Kuching, Sarawak	75		03063639	
					Kakap Batu Segar	<i>Lobotes surinamensis</i>	TANGKAP	Malaysia	Entikong	Kuching, Sarawak	75		03028929	
					Ikan Bawal Putih	<i>Pampus argenteus</i>	TANGKAP	Malaysia	Entikong	Kuching, Sarawak	150		03035920	
					Ikan Kakap Merah	<i>Lutjanus sp.</i>	TANGKAP	Malaysia	Entikong	Kuching, Sarawak	75		03028918	
18	CV. ROBBY JAYA	000033	H 004024	23-Feb-25	UDANG WANGKANG	<i>Penaeus orientalis</i>	TANGKAP	Malaysia	Sintete	Biawak, Sarawak	1440	3,471.63	03063639	0.00
19	CV. JESSLYN INDAH LESTARI	000034	H 004025	24-Feb-25	Udang Wangkang	<i>Penaeus orientalis</i>	TANGKAP	Malaysia	Entikong	Kuching, Sarawak	225	4,759.18	03063639	0.00
					Ikan Tenggiri	<i>S. commersoni</i>	TANGKAP	Malaysia	Entikong	Kuching, Sarawak	1200		03028919	
					Ikan Bawal Hitam	<i>Formio niger</i>	TANGKAP	Malaysia	Entikong	Kuching, Sarawak	375		03028917	
					Udang Dogol	<i>Penaeus merguensis</i>	TANGKAP	Malaysia	Entikong	Kuching, Sarawak	450		03063639	
20	CV. ROBBY JAYA	000035	H 004026	25-Feb-25	UDANG WANGKANG	<i>Penaeus orientalis</i>	TANGKAP	Malaysia	Sintete	Biawak, Sarawak	800	2,964.75	03063639	0.00
					Ikan Bawal Hitam	<i>Formio niger</i>	TANGKAP	Malaysia	Sintete	Biawak, Sarawak	640		03028917	
21	CV. JESSLYN INDAH LESTARI	000036	H 004027	26-Feb-25	Udang Wangkang	<i>Penaeus orientalis</i>	TANGKAP	Malaysia	Entikong	Kuching, Sarawak	600	4,679.04	03063639	0.00
					Ikan Tenggiri	<i>S. commersoni</i>	TANGKAP	Malaysia	Entikong	Kuching, Sarawak	450		03028919	
					Ikan Bawal Hitam	<i>Formio niger</i>	TANGKAP	Malaysia	Entikong	Kuching, Sarawak	750		03028917	
					Udang Dogol	<i>Penaeus merguensis</i>	TANGKAP	Malaysia	Entikong	Kuching, Sarawak	150		03063639	
					Kakap Batu Segar	<i>Lobotes surinamensis</i>	TANGKAP	Malaysia	Entikong	Kuching, Sarawak	75		03028929	
22	CV. ROBBY JAYA	000037	H 004028	26-Feb-25	UDANG WANGKANG	<i>Penaeus orientalis</i>	TANGKAP	Malaysia	Sintete	Biawak, Sarawak	1440	3,477.58	03063639	0.00
23	CV. JESSLYN INDAH LESTARI	000038	H 004029	28-Feb-25	Udang Wangkang	<i>Penaeus orientalis</i>	TANGKAP	Malaysia	Entikong	Kuching, Sarawak	375	2,622.90	03063639	0.00
					Ikan Tenggiri	<i>S. commersoni</i>	TANGKAP	Malaysia	Entikong	Kuching, Sarawak	150		03028919	
					Udang Dogol	<i>Penaeus merguensis</i>	TANGKAP	Malaysia	Entikong	Kuching, Sarawak	300		03063639	
					Ikan Kakap Merah	<i>Lutjanus sp.</i>	TANGKAP	Malaysia	Entikong	Kuching, Sarawak	300		03028918	

Pontianak, 6 Maret 2025

Mengetahui,
Katimja Pengendalian dan Pengawasan Mutu
Pasca Panen

Operator,

Dannia Patria Ratin, A.Md., S.Pi
NIP. 197911302005021002

Purnomo Putra, A.Md
NIP. 198703152014021003



**REKAP EKSPOR MUTU
STASIUN KIPM PONTIANAK TAHUN 2025**

NO.	NAMA UPI	PEMAKAIAN SERTIFIKAT/BULAN											
		JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEP	OKT	NOV	DES
1	PT. PULAUMAS KHATULISTIWA	1	3										
2	CV. JESSLYN INDAH LESTARI	6	11										
3	CV. ROBBY JAYA	10	9										
4	PERORANGAN TJHANG SE SU	-	-										
TOTAL		17	23										

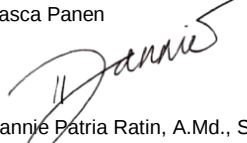
Mengesahkan,
Kepala SKIPM Pontianak,

Jimmy Y Elwaren, S.St.Pi
NIP. 197701242005021001



Mengetahui,
Katimja Pengendalian dan Pengawasan Mutu
Pasca Panen

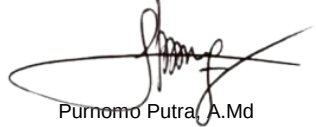
Dannie Patria Ratin, A.Md., S.Pi
NIP. 197911302005021002



Pontianak, 6 Maret 2025

Operator,

Purnomo Putra, A.Md
NIP. 198703152014021003



REKAPITULASI DATA SERTIFIKASI MUTU KELAUTAN HASIL PERIKANAN (SMKHP) EKSPOR
UPT STASIUN KIPM PONTIANAK

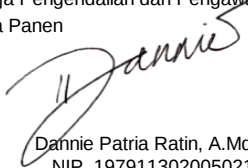
Laporan Bulan / Tahun : Maret 2025
Nama UPT KIPM : Pontianak

No.	Nama Perusahaan	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ekspor			Jenis Produk	Nama Latin / Spesies	Asal Bahan Baku	Negara Tujuan	Pelabuhan Keluar	Pelabuhan Masuk	Volume (Kg)	Nilai USD (\$)	HS Code	PNBP
		No. Sertifikat	No. Seri	Tanggal Penerbitan										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	CV. JESSLYN INDAH LESTARI	AE11.0III202500007	H 004031	02/03/2025	Udang Wangkang	<i>Penaeus orientalis</i>	Tangkap	Malaysia	ENTIKONG	KUCHING, SARAWAK	375	1138,803681	03063639	0.00
					Kakap Batu Segar	<i>Lobotes surinamensis</i>	Tangkap	Malaysia	ENTIKONG	KUCHING, SARAWAK	150	303,6809816	03028929	0.00
					Ikan Bawal Hitam	<i>Formio niger</i>	Tangkap	Malaysia	ENTIKONG	KUCHING, SARAWAK	975	1973,92638	03028917	0.00
					Ikan Tenggiri	<i>S. commersoni</i>	Tangkap	Malaysia	ENTIKONG	KUCHING, SARAWAK	750	1518,404908	03028919	0.00
2	CV. JESSLYN INDAH LESTARI	AE11.0III202500008	H 004032	06/03/2025	Udang Wangkang	<i>Penaeus orientalis</i>	Tangkap	Malaysia	ENTIKONG	KUCHING, SARAWAK	225	683,2822086	03063639	0.00
					Kakap Batu Segar	<i>Lobotes surinamensis</i>	Tangkap	Malaysia	ENTIKONG	KUCHING, SARAWAK	225	455,5214724	03028929	0.00
					Ikan Bawal Putih	<i>Pampus argenteus</i>	Tangkap	Malaysia	ENTIKONG	KUCHING, SARAWAK	75	182,208589	03035920	0.00
					Ikan Bawal Hitam	<i>Formio niger</i>	Tangkap	Malaysia	ENTIKONG	KUCHING, SARAWAK	975	1973,92638	03028917	0.00
3	PT. PULAUMAS KHATULISTIWA	AE11.0III202500010	G 250000151	07/03/2025	FROZEN PUD SAND PINK SHRIMPS	<i>Metapenaeus ensis</i>	Tangkap	Taiwan	PONTIANAK / SUPADIO (U)	KAOHSIUNG	10042	48165,54798	03061790	25,000.00
4	CV. ROBBY JAYA	AE11.0III202500011	H 004035	10/03/2025	ikan bawal putih segar	<i>Pampus argenteus</i>	Tangkap	Malaysia	SINTETE	BIAWAK, SARAWAK	560	906,993865	03035920	0.00
					IKAN KAKAP MERAH	<i>Lutjanus argentimaculatus</i>	Tangkap	Malaysia	SINTETE	BIAWAK, SARAWAK	640	1295,705521	03028918	0.00
					IKAN KURAU	<i>Polydactylus octonemus</i>	Tangkap	Malaysia	SINTETE	BIAWAK, SARAWAK	1200	1943,558282	03028919	0.00
5	CV. JESSLYN INDAH LESTARI	AE11.0III202500012	H 004034	10/03/2025	Udang Dogol	<i>Penaeus merguensis</i>	Tangkap	Malaysia	ENTIKONG	KUCHING, SARAWAK	150	303,6809816	03063639	0.00
					Udang Wangkang	<i>Penaeus orientalis</i>	Tangkap	Malaysia	ENTIKONG	KUCHING, SARAWAK	450	1366,564417	03063639	0.00
					Ikan Kurau	<i>Eleotheronema tetradactylum</i>	Tangkap	Malaysia	ENTIKONG	KUCHING, SARAWAK	75	227,7607362	03028919	0.00
					Ikan Kakap Merah	<i>Lutjanus sp.</i>	Tangkap	Malaysia	ENTIKONG	KUCHING, SARAWAK	225	455,5214724	03028918	0.00
					Ikan Bawal Putih	<i>Pampus argenteus</i>	Tangkap	Malaysia	ENTIKONG	KUCHING, SARAWAK	75	182,208589	03035920	0.00
					Ikan Bawal Hitam	<i>Formio niger</i>	Tangkap	Malaysia	ENTIKONG	KUCHING, SARAWAK	450	911,0429448	03028917	0.00
					Ikan Tenggiri	<i>S. commersoni</i>	Tangkap	Malaysia	ENTIKONG	KUCHING, SARAWAK	1425	2884,969325	03028919	0.00
6	CV. JESSLYN INDAH LESTARI	AE11.0III202500013	H 004036	12/03/2025	Udang Dogol	<i>Penaeus merguensis</i>	Tangkap	Malaysia	ENTIKONG	KUCHING, SARAWAK	75	151,8404908	03063639	0.00
					Udang Wangkang	<i>Penaeus orientalis</i>	Tangkap	Malaysia	ENTIKONG	KUCHING, SARAWAK	225	683,2822086	03063639	0.00
					Ikan Bawal Hitam	<i>Formio niger</i>	Tangkap	Malaysia	ENTIKONG	KUCHING, SARAWAK	525	1062,883436	03028917	0.00
					Ikan Tenggiri	<i>S. commersoni</i>	Tangkap	Malaysia	ENTIKONG	KUCHING, SARAWAK	525	1062,883436	03028919	0.00

7	CV. JESSLYN INDAH LESTARI	AE11.0III202500014	H 004037	14/03/2025	Udang Dogol	<i>Penaeus merguensis</i>	Tangkap	Malaysia	ENTIKONG	KUCHING, SARAWAK	375	759,202454	03063639	0.00
					Udang Wangkang	<i>Penaeus orientalis</i>	Tangkap	Malaysia	ENTIKONG	KUCHING, SARAWAK	450	1366,564417	03063639	0.00
					Ikan Kurau	<i>Eleotheronema tetradactylum</i>	Tangkap	Malaysia	ENTIKONG	KUCHING, SARAWAK	150	455,5214724	03028919	0.00
					Ikan Bawal Putih	<i>Pampus argenteus</i>	Tangkap	Malaysia	ENTIKONG	KUCHING, SARAWAK	75	182,208589	03035920	0.00
					Ikan Bawal Hitam	<i>Formio niger</i>	Tangkap	Malaysia	ENTIKONG	KUCHING, SARAWAK	975	1973,92638	03028917	0.00
					Ikan Tenggiri	<i>S. commersoni</i>	Tangkap	Malaysia	ENTIKONG	KUCHING, SARAWAK	375	759,202454	03028919	0.00
8	CV. JESSLYN INDAH LESTARI	AE11.0III202500015	H 004038	16/03/2025	Udang Dogol	<i>Penaeus merguensis</i>	Tangkap	Malaysia	ENTIKONG	KUCHING, SARAWAK	1200	2429,447853	03063639	0.00
					Udang Wangkang	<i>Penaeus orientalis</i>	Tangkap	Malaysia	ENTIKONG	KUCHING, SARAWAK	750	2277,607362	03063639	0.00
					Ikan Gulama	<i>Nibea albiflora</i>	Tangkap	Malaysia	ENTIKONG	KUCHING, SARAWAK	75	136,6564417	03028919	0.00
					Ikan Bawal Hitam	<i>Formio niger</i>	Tangkap	Malaysia	ENTIKONG	KUCHING, SARAWAK	450	911,0429448	03028917	0.00
					Ikan Tenggiri	<i>S.commersoni</i>	Tangkap	Malaysia	ENTIKONG	KUCHING, SARAWAK	75	1518,404908	03028919	0.00
9	CV. JESSLYN INDAH LESTARI	AE11.0III202500016	H 004039	18/03/2025	Udang Dogol	<i>Penaeus merguensis</i>	Tangkap	Malaysia	ENTIKONG	KUCHING, SARAWAK	450	911,0429448	03063639	0.00
					Udang Wangkang	<i>Penaeus orientalis</i>	Tangkap	Malaysia	ENTIKONG	KUCHING, SARAWAK	375	1138,803681	03063639	0.00
					Ikan Gulama	<i>Nibea albiflora</i>	Tangkap	Malaysia	ENTIKONG	KUCHING, SARAWAK	150	273,3128834	03028919	0.00
					Ikan Bawal Putih	<i>Pampus argenteus</i>	Tangkap	Malaysia	ENTIKONG	KUCHING, SARAWAK	75	182,208589	03035920	0.00
					Ikan Bawal Hitam	<i>Formio niger</i>	Tangkap	Malaysia	ENTIKONG	KUCHING, SARAWAK	450	911,0429448	03028917	0.00
					Ikan Tenggiri	<i>S.commersoni</i>	Tangkap	Malaysia	ENTIKONG	KUCHING, SARAWAK	150	303,6809816	03028919	0.00
10	CV. JESSLYN INDAH LESTARI	AE11.0III202500018	H 004041	21/03/2025	Udang Wangkang	<i>Penaeus orientalis</i>	Tangkap	Malaysia	ENTIKONG	KUCHING, SARAWAK	225	683,2822086	03063639	0.00
					Ikan Gulama	<i>Nibea albiflora</i>	Tangkap	Malaysia	ENTIKONG	KUCHING, SARAWAK	75	136,6564417	03028919	0.00
					Ikan Kurau	<i>Eleotheronema tetradactylum</i>	Tangkap	Malaysia	ENTIKONG	KUCHING, SARAWAK	75	227,7607362	03028919	0.00
					Ikan Bawal Putih	<i>Pampus argenteus</i>	Tangkap	Malaysia	ENTIKONG	KUCHING, SARAWAK	150	364,4171779	03035920	0.00
					Ikan Bawal Hitam	<i>Formio niger</i>	Tangkap	Malaysia	ENTIKONG	KUCHING, SARAWAK	225	455,5214724	03028917	0.00
					Kakap Batu Segar	<i>Lobates surinamensis</i>	Tangkap	Malaysia	ENTIKONG	KUCHING, SARAWAK	75	151,8404908	03028929	0.00
11	CV. JESSLYN INDAH LESTARI	AE11.0III202500019	H 004042	24/03/2025	Udang Dogol	<i>Penaeus merguensis</i>	Tangkap	Malaysia	ENTIKONG	KUCHING, SARAWAK	150	303,6809816	03063639	0.00
					Udang Wangkang	<i>Penaeus orientalis</i>	Tangkap	Malaysia	ENTIKONG	KUCHING, SARAWAK	375	1138,803681	03063639	0.00
					Kakap Batu Segar	<i>Lobates surinamensis</i>	Tangkap	Malaysia	ENTIKONG	KUCHING, SARAWAK	75	151,8404908	03028929	0.00
					Ikan Bawal Putih	<i>Pampus argenteus</i>	Tangkap	Malaysia	ENTIKONG	KUCHING, SARAWAK	150	364,4171779	03035920	0.00
					Ikan Bawal Hitam	<i>Formio niger</i>	Tangkap	Malaysia	ENTIKONG	KUCHING, SARAWAK	1125	2277,607362	03028917	0.00
					Ikan Tenggiri	<i>S. commersoni</i>	Tangkap	Malaysia	ENTIKONG	KUCHING, SARAWAK	225	455,5214724	03028919	0.00

12	CV. JESSLYN INDAH LESTARI	AE11.0III202500020	H 004043	26/03/2025	Udang Dogol	<i>Penaeus merguensis</i>	Tangkap	Malaysia	ENTIKONG	KUCHING, SARAWAK	150	303,6809816	03063639	0.00
					Udang Wangkang	<i>Penaeus orientalis</i>	Tangkap	Malaysia	ENTIKONG	KUCHING, SARAWAK	225	683,2822086	03063639	0.00
					Ikan Gulama	<i>Nibea albiflora</i>	Tangkap	Malaysia	ENTIKONG	KUCHING, SARAWAK	75	136,6564417	03028919	0.00
					Ikan Bawal Putih	<i>Pampus argenteus</i>	Tangkap	Malaysia	ENTIKONG	KUCHING, SARAWAK	150	364,4171779	03035920	0.00
					Ikan Bawal Hitam	<i>Formio niger</i>	Tangkap	Malaysia	ENTIKONG	KUCHING, SARAWAK	375	759,202454	03028917	0.00
					Ikan Tenggiri	<i>S.commersemi</i>	Tangkap	Malaysia	ENTIKONG	KUCHING, SARAWAK	450	911,0429448	03028919	0.00


Kepala SKIPM Pontianak,
Jimmy F. Elwareh, S.St.Pi
NIP. 197701242005021001

Mengetahui,
Katimja Pengendalian dan Pengawasan Mutu
Pasca Panen

Dannie Patria Ratin, A.Md., S.Pi
NIP. 197911302005021002

Pontianak, 10 April 2025
Operator,

Purnomo Putra, A.Md
NIP. 198703152014021003

**REKAP EKSPOR MUTU
STASIUN KIPM PONTIANAK TAHUN 2025**

NO.	NAMA UPI	PEMAKAIAN SERTIFIKAT/BULAN											
		JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEP	OKT	NOV	DES
1	PT. PULAUMAS KHATULISTIWA	1	3	1									
2	CV. JESSLYN INDAH LESTARI	6	11	10									
3	CV. ROBBY JAYA	10	9	1									
4	PERORANGAN TJHANG SE SU	-	-										
TOTAL		17	23	12									

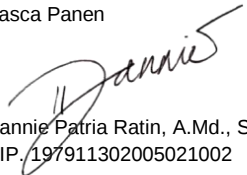
Mengesahkan,
Kepala SKIPM Pontianak,

Jimmy Elwaren, S.St.Pi
NIP. 197701242005021001



Mengetahui,
Katimja Pengendalian dan Pengawasan Mutu
Pasca Panen

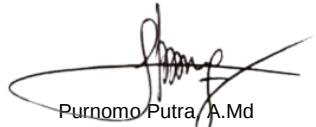
Dannie Patria Ratin, A.Md., S.Pi
NIP. 197911302005021002



Pontianak, 10 April 2025

Operator,

Purnomo Putra, A.Md
NIP. 198703152014021003



Nilai Temuan Keuangan	
Total Nilai Temuan Hasil Pengawasan	
Rp29,840,161.00	
Setoran Ke Kas Negara Tuntas per 15 Apr 2025	
Rp29,840,161.00	Prosentase: 100.00%
Rp0.00 Sisa temuan keuangan yang belum tuntas per 15 Apr 2025	0.00%
NOTE: Segera lakukan proses tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern Inspektorat Jenderal yang dapat dilaksanakan secara online. Kirim bukti tindak lanjut dengan mengupload dokumen bukti ke dalam sistem aplikasi SIDAK melalui Menu Manage TLHP.	

The screenshot displays the 'IKU Success' page. On the left, there is a sidebar menu with three items: 'Daftar LHP' (with a document icon), 'Change Password' (with a lock icon), and 'Logout' (with a power icon). The main content area features a large green semi-circular progress indicator that is nearly full, representing 100% completion. Above the indicator, the text 'CAPAIAN TLHP 100%' is displayed. Below the indicator, the text '100%' appears on both the left and right sides. At the bottom left, the status is confirmed as 'STATUS : IKU Success'.

JUMLAH KEJADIAN : 21

Kategori	Jumlah
Kepatuhan	: 6 Temuan
Kelemahan SPI	: 15 Temuan
Temuan 3-E	: 0 Temuan

JUMLAH LHP : 4

Kategori	Jumlah
LHP BAB	: 3 LHP
LHP SURAT	: 1 LHP
CHR	: 0 CHR
NOTA DINAS	: 0 DOK

JUMLAH REKOM/SARAN : 42

Kategori	Jumlah
Tuntas	42 Rekom
Proses	0 Rekom
Pending	0 Rekom
RTDD	0 Rekom

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS

Nomor : 2/SJ.7/TU.140/IV/2025

Yth. : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
7. Sekretaris Inspektorat Jenderal
8. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan
9. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
10. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan
11. Para Kepala Biro/Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal;

Dari : Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa

Hal : Penyampaian hasil perhitungan Capaian Indikator Kinerja persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP Triwulan 1 tahun anggaran 2025

Lampiran : 1 Berkas

Tanggal : 14 April 2025

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya upaya optimalisasi kinerja Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Triwulan 1 tahun anggaran 2025 sebagai tindak lanjut atas terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, seluruh satuan kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan tindak lanjut berupa identifikasi belanja

pengadaan (PBJ) yang terdampak efisiensi belanja dan dapat dipastikan tidak dapat direalisasikan sehingga tidak diumumkan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).

Total sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) Satuan kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tersebar pada 10 (sepuluh) unit eselon 1 telah melakukan identifikasi efisiensi belanja pengadaan yang dituangkan ke dalam penyusunan kertas kerja (format excel) sebagai data dukung klarifikasi penyesuaian Pagu Pengadaan pasca efisiensi yang akan disampaikan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), kemudian dilanjutkan dengan melakukan revisi RUP pada SIRUP berdasarkan kertas kerja klarifikasi yang telah disusun tersebut. Sehingga, diharapkan dapat mencegah terjadinya persentase pengumuman RUP pada SIRUP yang melebihi 100% (seratus persen).

Data yang terbentuk pada kertas kerja klarifikasi untuk nilai Pagu Terumumkan pasca efisiensi, nantinya setelah dilakukan penyesuaian oleh LKPP dan digunakan sebagai acuan untuk menjadi Pagu Pengadaan di dalam Statistik Moner SIRUP. Sedangkan, revisi RUP yg dilakukan satker pada SIRUP akan membentuk data baru sebagai Pagu Terumumkan di dalam Statistik Moner SIRUP. Sehingga, berdasarkan manual indikator perhitungan capaian IKU untuk persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP Triwulan 1 tahun anggaran 2025, formula dan ketentuan perhitungannya sebagai berikut;

Formulasi pengukuran/penilaian sebagai berikut:

$$\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP} \times 100\%}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}}$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Berikut data hasil perhitungan capaian Indikator Kinerja untuk persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP Triwulan 1 tahun anggaran 2025 pada setiap Unit Eselon 1;

No.	Nama Unit Eselon 1	Persentase RUP Terumumkan				% Capaian IKU TW 1
		Pagu Pengadaan	Pagu Terumumkan	Selisih	% RUP Terumumkan	
1	Inspektorat Jenderal	3,074,204,000.00	3,074,204,000.00	-	100.00%	100.00%
2	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	232,904,737,000.00	232,904,737,000.00	-	100.00%	100.00%
3	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	30,061,146,000.00	30,061,146,000.00	-	100.00%	100.00%
4	Sekretariat Jenderal	141,198,357,000.00	141,198,357,000.00	-	100.00%	100.00%
5	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	474,070,870,541.00	474,070,870,541.00	-	100.00%	100.00%
6	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	154,301,450,168.00	154,301,450,168.00	-	100.00%	100.00%
7	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan *	161,663,139,000.00	161,780,884,000.00	(117,745,000.00)	100.07%	99.93%
8	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap **	688,474,617,688.00	688,285,621,000.00	188,996,688.00	99.97%	99.97%
9	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan ***	42,318,573,722.00	42,715,615,722.00	(397,042,000.00)	100.94%	99.06%

Sebagai informasi, terdapat 6 (lima) satuan kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memperoleh capaian persentase RUP Terumumkan tidak 100% (seratus persen), yang disebabkan oleh adanya LEBIH / KURANG TERUMUMKAN di dalam SIRUP, antara lain;

❖ **Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**

- 1) Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung persentase 101,52%;

❖ **Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap**

- 1) Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga persentase 139,11%;
- 2) Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon persentase 94,75%;
- 3) Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman persentase 79,56%;

❖ **Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan**

- 1) Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan persentase 105,75%.

Demikian kami sampaikan, atas atensi dan kerja sama dari seluruh pihak terkait dalam upaya peningkatan kinerja perencanaan PBJ yang telah dilaksanakan, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sofiyanto

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

NO	Nama_Satker	KERTAS KERJA KLARIFIKASI (file EXCEL)			REKAP RUP TERUMUMKAN (aplikasi SIRUP)		
		RUP Eksisting	Nilai Identifikasi Efisiensi Belanja	RUP Pasca Revisi	Persentase RUP Terumumkan		
		Pagu Terumumkan		Pagu Terumumkan	Selisih KERTAS KERJA - SIRUP	Pagu Terumumkan	%
11	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KWANDANG	3,817,270,000	1,582,763,000	2,234,507,000	0	2,234,507,000	100.00%
12	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	301,142,412,000	81,549,421,000	219,592,991,000	0	219,592,991,000	100.00%
13	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG	6,367,671,000	3,959,325,000	2,408,346,000	0	2,408,346,000	100.00%
14	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN	260,214,908,000	3,727,756,000	256,487,152,000	0	256,487,152,000	100.00%
15	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE	5,691,813,000	2,885,497,000	2,806,316,000	0	2,806,316,000	100.00%
16	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI	40,131,847,000	5,582,775,000	34,549,072,000	0	34,549,072,000	100.00%
17	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG PANDAN	4,741,886,000	3,397,358,000	1,344,528,000	0	1,344,528,000	100.00%
18	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SUNGAILIAT	5,016,456,000	3,801,293,000	1,215,163,000	0	1,215,163,000	100.00%
19	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN	8,285,054,000	1,787,024,000	6,498,030,000	0	6,498,030,000	100.00%
20	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI	4,080,248,000	2,147,780,000	1,932,468,000	0	1,932,468,000	100.00%
21	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	6,263,656,000	2,516,166,200	3,747,489,800	0	3,747,489,800	100.00%
22	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA	5,351,273,000	2,473,815,000	2,877,458,000	1,125,582,000	4,003,040,000	139.12%
23	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON	5,110,199,000	2,895,155,112	2,215,043,888	(116,240,888)	2,098,803,000	94.75%
24	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN	30,796,027,000	18,028,494,000	12,767,533,000	(2,609,427,000)	10,158,106,000	79.56%
	TOTAL	852,008,306,000	163,533,688,312	688,474,617,688	(1,600,085,888)	686,874,531,800	99.77%

✚ Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

NO	Nama_Satker	KERTAS KERJA KLARIFIKASI (file EXCEL)			REKAP RUP TERUMUMKAN (aplikasi SIRUP)		
		RUP Eksisting	Nilai Identifikasi Efisiensi Belanja	RUP Pasca Revisi	Persentase RUP Terumumkan		
		Pagu Terumumkan		Pagu Terumumkan	Selisih KERTAS KERJA - SIRUP	Pagu Terumumkan	%
1	BALAI KIPMHKP SURABAYA I	7,333,862,000	2,731,893,000	4,601,969,000	0	4,601,969,000	100.00%
2	BALAI KIPMHKP MEDAN I	3,610,142,000	1,382,357,000	2,227,785,000	0	2,227,785,000	100.00%
3	BALAI BESAR KIPMHKP MAKASSAR	4,273,547,000	2,159,240,000	2,114,307,000	0	2,114,307,000	100.00%
4	BALAI KIPMHKP DENPASAR	2,823,538,000	1,039,528,000	1,784,010,000	0	1,784,010,000	100.00%
5	STASIUN KIPMHKP BATAM	2,247,622,000	896,360,302	1,351,261,698	0	1,351,261,698	100.00%

NO	Nama_Satker	KERTAS KERJA KLARIFIKASI (file EXCEL)			REKAP RUP TERUMUMKAN (aplikasi SIRUP)		
		RUP Eksisting	Nilai Identifikasi Efisiensi Belanja	RUP Pasca Revisi	Persentase RUP Terumumkan		
		Pagu Terumumkan		Pagu Terumumkan	Selisih KERTAS KERJA - SIRUP	Pagu Terumumkan	%
6	STASIUN KIPMHKP PADANG	1,695,668,000	951,373,000	744,295,000	0	744,295,000	100.00%
7	STASIUN KIPMHKP PALEMBANG	1,536,305,000	848,465,000	687,840,000	0	687,840,000	100.00%
8	STASIUN KIPMHKP PONTIANAK	2,858,459,000	1,368,402,000	1,490,057,000	0	1,490,057,000	100.00%
9	BALAI KIPMHKP BALIKPAPAN	1,110,080,000	669,643,000	440,437,000	0	440,437,000	100.00%
10	BALAI KIPMHKP MANADO	3,933,678,000	2,221,985,000	1,711,693,000	0	1,711,693,000	100.00%
11	STASIUN KIPMHKP KENDARI	656,543,000	305,302,000	351,241,000	0	351,241,000	100.00%
12	BALAI KIPMHKP MATARAM	1,734,377,000	651,863,000	1,082,514,000	0	1,082,514,000	100.00%
13	BALAI KIPMHKP JAYAPURA	1,550,045,000	1,150,895,000	399,150,000	0	399,150,000	100.00%
14	STASIUN KIPMHKP MAMUJU	103,423,000	68,423,000	35,000,000	0	35,000,000	100.00%
15	STASIUN KIPMHKP KUPANG	989,490,000	930,680,000	58,810,000	0	58,810,000	100.00%
16	STASIUN KIPMHKP ACEH	1,914,801,000	879,607,000	1,035,194,000	0	1,035,194,000	100.00%
17	BALAI KIPMHKP BANJARMASIN	1,493,827,000	928,664,000	565,163,000	0	565,163,000	100.00%
18	STASIUN KIPMHKP PALU	454,470,000	420,370,000	34,100,000	0	34,100,000	100.00%
19	STASIUN KIPMHKP BENGKULU	1,174,326,000	737,555,000	436,771,000	0	436,771,000	100.00%
20	STASIUN KIPMHKP JAMBI	430,007,000	137,403,100	173,413,900	0	173,413,900	100.00%
21	STASIUN KIPMHKP PALANGKARAYA	1,118,531,000	453,628,000	664,903,000	0	664,903,000	100.00%
22	BALAI KIPMHKP SEMARANG	2,236,942,000	1,046,512,000	1,190,430,000	0	1,190,430,000	100.00%
23	STASIUN KIPMHKP GORONTALO	910,816,000	684,050,000	226,766,000	0	226,766,000	100.00%
24	BALAI KIPMHKP JAKARTA II	2,858,688,000	1,001,469,000	1,857,219,000	0	1,857,219,000	100.00%
25	STASIUN KIPMHKP MERAK	1,654,275,000	995,923,000	658,352,000	0	658,352,000	100.00%
26	STASIUN KIPMHKP PANGKAL PINANG	1,871,554,000	864,822,000	1,006,732,000	0	1,006,732,000	100.00%
27	STASIUN KIPMHKP MERAUKE	1,566,920,000	798,865,000	768,055,000	0	768,055,000	100.00%
28	STASIUN KIPMHKP SORONG	556,662,000	217,925,000	338,737,000	0	338,737,000	100.00%
29	STASIUN KIPMHKP YOGYAKARTA	1,414,763,000	604,480,000	810,283,000	0	810,283,000	100.00%
30	STASIUN KIPMHKP CIREBON	2,929,266,000	1,306,538,000	1,622,728,000	0	1,622,728,000	100.00%

NO	Nama_Satker	KERTAS KERJA KLARIFIKASI (file EXCEL)			REKAP RUP TERUMUMKAN (aplikasi SIRUP)		
		RUP Eksisting	Nilai Identifikasi Efisiensi Belanja	RUP Pasca Revisi	Persentase RUP Terumumkan		
		Pagu Terumumkan		Pagu Terumumkan	Selisih KERTAS KERJA - SIRUP	Pagu Terumumkan	%
31	BALAI KIPMHKP AMBON	1,659,694,000	1,031,308,000	628,386,000	0	628,386,000	100.00%
32	STASIUN KIPMHKP TERNATE	429,629,000	316,664,000	112,965,000	0	112,965,000	100.00%
33	BALAI UJI STANDAR KIPMHKP	6,408,384,000	3,693,415,000	2,714,969,000	0	2,714,969,000	100.00%
34	BALAI KIPMHKP TARAKAN	1,645,435,000	1,490,679,200	154,755,800	0	154,755,800	100.00%
35	STASIUN KIPMHKP PEKANBARU	2,140,551,000	1,748,549,000	392,002,000	0	392,002,000	100.00%
36	BALAI KIPMHKP LAMPUNG	1,470,733,574	525,392,250	945,341,324	0	945,341,324	100.00%
37	SEKRETARIAT BADAN KIPMHKP	44,427,679,000	37,526,741,000	6,900,938,000	397,042,000	7,297,980,000	105.75%
	TOTAL	117,224,732,574	74,786,968,852	42,318,573,722	397,042,000	42,715,615,722	100.94%



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sofiyanto



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAM www.kkp.go.id SUREL set.bppmhkp@kkp.go.id

Nomor : B.1856/BPPMHKP.1/KI.120/IV/2025 14 April 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Hasil Validasi Survei Kepuasan Masyarakat
Triwulan 1 Tahun 2025 UPP BPPMHKP

Yth. Kepala UPT Lingkup BPPMHKP
di tempat

Sehubungan dengan berakhirnya periode Triwulan 1 tahun 2025 telah dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna jasa layanan UPP BPPMHKP dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP).

Adapun target yang ditetapkan pada triwulan 1 tahun 2025 adalah 88 dan telah tertuang pada Perjanjian Kinerja tahun 2025 pada masing-masing UPT lingkup BPPMHKP. Berikut beberapa catatan hasil validasi terhadap validasi nilai SKM sebagai pedoman untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan kinerja pelayanan pada periode berikutnya yaitu:

1. Rata-rata nilai SKM yang didapatkan dari seluruh UPP BPPMHKP pada Triwulan I Tahun 2025 adalah 93,58 dengan kategori nilai "Sangat Baik" melebihi dari target yang telah ditetapkan.
2. Nilai SKM tertinggi diperoleh oleh UPT SKIPM Ternate, SKIPM Batam dan SKIPM Pekanbaru. Sedangkan nilai SKM kurang dari target dicapai oleh SKIPM Gorontalo, SKIPM Kendari dan SKIPM Tanjung Balai Asahan.
3. Hasil SKM berdasarkan jenis layanan berdasarkan rekap per unsur layanan dari 14 layanan terdapat 11 layanan mendapatkan kategori "Sangat Baik" dan 3 layanan mendapatkan kategori "Baik" yaitu:
 - Layanan Penerbitan Sertifikat CPOIB (88,19)
 - Layanan Penerbitan Sertifikat CBIB (87,63)

- Layanan Uji Profisiensi bagi Laboratorium Pengujian Penyakit Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan. (84,88)
4. Rekapitulasi per unsur pada setiap jenis layanan didapatkan rincian nilai sebagai berikut:

- Persyaratan (U1) = 3,78
- Sistem, Mekanisme dan Prosedur (U2) = 3,76
- Waktu Penyelesaian (U3) = 3,74
- Biaya/ Tarif (U4) = 3,77
- Produk layanan (U5) = 3,77
- Kompetensi Pelayanan (U6) = 3,67
- Perilaku Pelaksana (U7) = 3,69
- Penanganan Pengaduan (U8) = 3,77
- Sarana dan Prasarana (U9) = 3,74

Nilai terendah ada pada 3 unsur U6, U7 dan U3. Dalam hal ini U3 dan U9 mempunyai nilai rata-rata yang sama yaitu 3,74 namun dengan rincian jumlah rendah per layanan yang lebih banyak (tertanda merah pada tabel rekapitulasi per unsur)

5. Berdasarkan hasil validasi tersebut mohon kepada kepala UPT untuk dapat memberikan perhatian lebih pada jenis layanan yang mempunyai nilai rendah dan unsur dengan nilai terendah dalam melakukan tindak lanjut perbaikan pada aspek-aspek yang dapat meningkatkan kinerja setiap unsur pelayanan pada seluruh jenis layanan yang diampu oleh UPP masing-masing

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Hari Maryadi

Tembusan:

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Lampiran Surat Dinas

Nomor : B.1856/BPPMHKP.1/KI.120/IV/2025

Tanggal : 14 April 2025

**Rekapitulasi Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
Unit Pelayanan lingkup BPPMHKP
Triwulan I Tahun 2025**

NO	UNIT PELAYANAN PUBLIK	IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN	JUMLAH RESPONDEN	Keterangan
1	Stasiun KIPM Ternate	99.69	A	Sangat Baik	45	Tercapai
2	Stasiun KIPM Batam	99.04	A	Sangat Baik	29	Tercapai
3	Stasiun KIPM Pekanbaru	98.65	A	Sangat Baik	74	Tercapai
4	Balai KIPM Banjarmasin	97.82	A	Sangat Baik	182	Tercapai
5	Stasiun KIPM Luwuk Banggai	97.65	A	Sangat Baik	13	Tercapai
6	Balai KIPM Medan I	96.53	A	Sangat Baik	32	Tercapai
7	Balai KIPM Ambon	96.34	A	Sangat Baik	101	Tercapai
8	Stasiun KIPM Pontianak	96.22	A	Sangat Baik	58	Tercapai
9	Balai KIPM Denpasar	96.16	A	Sangat Baik	177	Tercapai
10	Balai KIPM Mataram	95.95	A	Sangat Baik	24	Tercapai
11	Stasiun KIPM Bengkulu	95.94	A	Sangat Baik	13	Tercapai
12	Stasiun KIPM Yogyakarta	95.83	A	Sangat Baik	18	Tercapai
13	Balai KIPM Tanjung Pinang	95.44	A	Sangat Baik	153	Tercapai
14	Stasiun KIPM Merauke	95.11	A	Sangat Baik	25	Tercapai
15	Stasiun KIPM Bandung	94.94	A	Sangat Baik	39	Tercapai
16	Stasiun KIPM Bima	94.68	A	Sangat Baik	12	Tercapai
17	Balai KIPM Semarang	94.67	A	Sangat Baik	73	Tercapai
18	Stasiun KIPM Jambi	94.62	A	Sangat Baik	31	Tercapai
19	Balai KIPM Jayapura	94.61	A	Sangat Baik	17	Tercapai
20	Stasiun KIPM Palu	94.44	A	Sangat Baik	17	Tercapai
21	Stasiun KIPM Pangkal Pinang	94.38	A	Sangat Baik	46	Tercapai
22	Stasiun KIPM Aceh	94.05	A	Sangat Baik	7	Tercapai
23	Stasiun KIPM Cirebon	93.98	A	Sangat Baik	60	Tercapai
24	Stasiun KIPM Bau-Bau	93.92	A	Sangat Baik	21	Tercapai
25	Balai KIPM Entikong	93.75	A	Sangat Baik	16	Tercapai
26	Balai Besar KIPM Makassar	93.39	A	Sangat Baik	197	Tercapai
27	Stasiun KIPM Palembang	93.36	A	Sangat Baik	51	Tercapai

NO	UNIT PELAYANAN PUBLIK	IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN	JUMLAH RESPONDEN	Keterangan
28	Balai KIPM Surabaya II	92.86	A	Sangat Baik	107	Tercapai
29	Stasiun KIPM Tahuna	92.59	A	Sangat Baik	3	Tercapai
30	Balai KIPM Manado	92.40	A	Sangat Baik	38	Tercapai
31	Stasiun KIPM Padang	92.28	A	Sangat Baik	9	Tercapai
32	Stasiun KIPM Medan II	91.73	A	Sangat Baik	132	Tercapai
33	Balai KIPM Tarakan	91.55	A	Sangat Baik	24	Tercapai
34	Stasiun KIPM Palangkaraya	91.25	A	Sangat Baik	20	Tercapai
35	Balai KIPM Jakarta II	91.15	A	Sangat Baik	43	Tercapai
36	Balai KIPM Balikpapan	91.11	A	Sangat Baik	70	Tercapai
37	Balai Uji Standar KIPM	91.06	A	Sangat Baik	23	Tercapai
38	Stasiun KIPM Kupang	90.87	A	Sangat Baik	63	Tercapai
39	Balai KIPM Lampung	90.21	A	Sangat Baik	42	Tercapai
40	Balai Besar KIPM Jakarta I	89.92	A	Sangat Baik	86	Tercapai
41	Stasiun KIPM Mamuju	89.48	A	Sangat Baik	14	Tercapai
42	Balai KIPM Surabaya I	89.43	A	Sangat Baik	143	Tercapai
43	Stasiun KIPM Merak	89.37	A	Sangat Baik	64	Tercapai
44	Stasiun KIPM Sorong	89.21	A	Sangat Baik	26	Tercapai
45	Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan	87.62	B	Baik	24	Tidak Tercapai
46	Stasiun KIPM Kendari	86.69	B	Baik	53	Tidak Tercapai
47	Stasiun KIPM Gorontalo	85.31	B	Baik	38	Tidak Tercapai

Lampiran Surat Dinas

Nomor : B.1856/BPPMHKP.1/KI.120/IV/2025

Tanggal : 14 April 2025

**Rekapitulasi Hasil Monitoring Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
Nama Layanan lingkup BPPMHKP Triwulan I 2025**

NO	NAMA LAYANAN	JUMLAH RESPONDEN	NILAI RATA-RATA UNSUR LAYANAN									NILAI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9			
1	Penyediaan Koleksi Standar/Bahan Acuan/Kontrol Positif	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100	A	Sangat Baik
2	Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100	A	Sangat Baik
3	Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik	84	3.83	3.8	3.8	3.82	3.83	3.79	3.82	3.83	3.82	95.4	A	Sangat Baik
4	Penjaminan Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (Health Certificate for Fish and Fishery Products) untuk Pengeluaran dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	1451	3.81	3.8	3.79	3.8	3.79	3.74	3.74	3.81	3.77	94.57	A	Sangat Baik
5	Jasa Pengujian Hama Penyakit Ikan Karantina, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, serta Kualitas Air	202	3.82	3.78	3.72	3.8	3.78	3.54	3.62	3.79	3.8	93.45	A	Sangat Baik
6	Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point (PMMT/ HACCP)	503	3.77	3.77	3.71	3.75	3.76	3.62	3.65	3.78	3.75	93.21	A	Sangat Baik
7	Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik	5	3.6	3.6	3.8	3.6	3.6	3.8	3.8	3.6	3.8	92.22	A	Sangat Baik

NO	NAMA LAYANAN	JUMLAH RESPONDEN	NILAI RATA-RATA UNSUR LAYANAN									NILAI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9			
8	Penerbitan Nomor Registrasi Unit Pengolahan Ikan ke Negara Mitra (Approval Number)	3	3.67	3.33	3.67	4	4	3.33	3.33	4	3.67	91.67	A	Sangat Baik
9	Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan	10	3.8	3.3	3.7	3.6	3.7	3.3	3.8	3.8	3.8	91.11	A	Sangat Baik
10	Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan	208	3.64	3.56	3.55	3.63	3.65	3.53	3.54	3.63	3.58	89.77	A	Sangat Baik
11	Penerbitan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik	24	3.88	3.54	3.58	3.71	3.71	3.38	3.33	3.67	3.42	89.47	A	Sangat Baik
12	Penerbitan Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik	4	3.75	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	88.19	B	Baik
13	Uji Profisiensi bagi Laboratorium Pengujian Penyakit Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan	11	3.73	3.64	3.36	3.36	3.55	3.36	3.55	3.36	3.64	87.63	B	Baik
14	Penerbitan Sertifikat Cara Budi Daya Ikan yang Baik	45	3.42	3.42	3.38	3.42	3.42	3.38	3.33	3.42	3.36	84.88	B	Baik
SELURUH LAYANAN BPPMHKP		2553	3.78	3.76	3.74	3.77	3.77	3.67	3.69	3.77	3.74	93.58	A	Sangat Baik



LAPORAN SKM PELAKSANAAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

TRIWULAN I
TAHUN 2025



BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
PONTIANAK



08.26
WhatsApp
KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

1

Nama UPT
Pilih

Tanggal
21 Maret 2023

Mohon kerindan Anda untuk memberikan penilaian dan masukan, dimana hal ini akan meningkatkan kualitas layanan kami.
Silahkan diisi dengan mengklik option radio sesuai dengan penilaian yang diberikan

No	UNSUR SKM	NILAI		
1	Apakah anda/badan hukum/organisasi dapat memaharasi persyaratan pelayanan yang tersedia diunit kerja kami	Tidak Paham ☐	Kurang Paham ☐	Paha ☐
2	Apakah sistem, prosedur, dan pelayanan...	Tidak Paham ☐	Kurang Paham ☐	Paha ☐

Hot S...
ok.bkpm.kkp.go.id

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenan dan karuniaNya, maka Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan I Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat yang dilakukan melalui e-survey yang selanjutnya diolah untuk mengetahui nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Nilai IKM merupakan tolok ukur kualitas pelayanan yang dinyatakan dalam bentuk angka berdasarkan persepsi dan penilaian masyarakat. Selanjutnya dari nilai tersebut dijadikan dasar tindakan perbaikan maupun peningkatan dan inovasi dalam pelaksanaan kegiatan layanan yang berkelanjutan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan terlibat dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi publik. Masukan serta saran kami harapkan guna peningkatan kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

Pontianak, 08 April 2025
Kepala SKIPM Pontianak



Jimmy Y. Elwaren

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
 BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Pengertian Umum	2
1.4. Maksud dan Tujuan.....	3
1.5. Manfaat.....	5
1.6. Hasil yang Diharapkan.....	5
 BAB II. PENGUMPULAN DATA SKM	
2.1. Pelaksana SKM	6
2.2. Metode Pengumpulan Data.....	6
2.3. Lokasi Pengumpulan Data.....	7
2.4. Waktu Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	7
2.5. Penentuan Jumlah Responden.....	7
 BAB III. HASIL PENGOLAHAN DATA SKM	
3.1. Jumlah Responden SKM	8
3.1. Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan).....	9
 BAB IV. ANALISA HASIL	
4.1. Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan	11
4.2. Rencana tindak Lanjut	19
4.3. Tren Kepuasan Masyarakat SKIPM Pontianak	21
 BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	22

DAFTAR GRAFIK

Halaman

GRAFIK 1. Perbandingan persentase indeks nilai unsur pelayanan

Triwulan III, IV Tahun 2024 dan I Tahun 2025 23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Dasar 1945 telah mengamanatkan bahwa Negara wajib melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan publik menurut Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Tatanan baru masyarakat global dihadapkan pada harapan dan tantangan yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi informasi, komunikasi, transportasi, investasi, dan perdagangan. Kondisi dan perubahan cepat yang diikuti pergeseran nilai tersebut perlu disikapi secara bijak melalui langkah kegiatan yang terus menerus dan berkesinambungan dalam berbagai aspek pembangunan untuk membangun kepercayaan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Untuk itu, diperlukan konsepsi sistem pelayanan publik yang berisi nilai, persepsi dan acuan perilaku yang mampu mewujudkan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sehingga masyarakat memperoleh pelayanan sesuai dengan harapan dan cita-cita tujuan nasional.

Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu ciri dari pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sebagai tujuan dari pendayagunaan aparatur negara. Dalam kaitan inilah maka peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya yang harus dilakukan secara terus menerus, berkelanjutan dan harus dilaksanakan oleh semua para aparatur pemerintah.

SKIPM Pontianak berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kepada seluruh *stakeholder*, hal ini telah tertuang dalam Klausul 9.1.2 tentang Kepuasan Pelanggan sebagai bagian dalam Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015. Salah satu upaya yang dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah dengan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna layanan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang didapatkan dari unit pelayanan publik. Mengingat unit layanan publik sangat beragam, untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat diperlukan metode survei yang seragam sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan MenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. SKM menurut Pasal 20-39 Undang-Undang Nomor 25. Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik merupakan bentuk kerjasama antara Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan Masyarakat dalam rangka melakukan penilaian kinerja pelayanan, agar penyelenggara layanan dapat meningkatkan kualitas layanannya, dimana sesuai dengan Pasal 1 PERMENPAN dilaksanakan minimal setiap setahun sekali dan wajib dipublikasikan.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam Pelaporan Survei Kepuasan Masyarakat ini antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik.
- d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- e. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1.3. Pengertian Umum

Dalam laporan ini yang dimaksud dengan:

- a. Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.
- b. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat).
- c. Unit pelayanan publik adalah unit kerja/kantor pelayanan pada instansi pemerintah, yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan.
- d. Unsur Survei Kepuasan Masyarakat adalah unsur-unsur yang menjadi indikator pengukuran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
- e. Survei periodik adalah survei yang dilakukan oleh pemberi layanan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan (triwulan), atau 6 (enam) bulan (semester) atau minimal 1 (tahun) sekali.
- f. Pemberi pelayanan publik adalah pegawai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai peraturan perundang-undangan.
- g. Penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat, lembaga instansi pemerintah dan dunia usaha, yang menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.
- h. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik.
- i. Unsur pelayanan adalah faktor atau aspek yang terdapat dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sebagai variabel penyusunan survei kepuasan masyarakat untuk mengetahui kinerja unit pelayanan.
- j. Responden adalah penerima pelayanan publik yang pada saat pencacahan sedang berada di lokasi unit pelayanan, atau yang pernah menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan.
- k. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kinerja aparatur pelayanan SKIPM Pontianak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sekaligus sebagai wahana penyerap aspirasi masyarakat baik yang berupa saran, harapan, sekaligus komplain terhadap pelayanan yang telah diberikan selama ini untuk dijadikan pedoman kebijakan, program dan strategi guna peningkatan pelayanan. Selain hal tersebut secara spesifik survei kepuasan masyarakat bertujuan untuk:

1. Mengetahui tingkat kepuasan atau ketidakpuasan masyarakat dan mendengarkan kebutuhan pengguna layanan SKIPM Pontianak sebagai unit penyelenggara pelayanan publik dalam memberikan pelayanan sertifikasi produk perikanan.
2. Mengukur secara berkala penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh SKIPM Pontianak sebagai unit pelayanan publik dalam memberikan pelayanan sertifikasi produk perikanan.

Pada sisi lain, tujuan utama survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sertifikasi di SKIPM Pontianak adalah untuk mengetahui kinerja SKIPM Pontianak dengan melihat kategori;

1. Nilai persepsi masyarakat terhadap pelayanan produk perikanan di SKIPM Pontianak.
2. Nilai interval mutu pelayanan sertifikasi produk perikanan di SKIPM Pontianak.
3. Nilai interval konversi pelayanan sertifikasi produk perikanan di SKIPM Pontianak.
4. Mutu pelayanan sertifikasi produk perikanan di SKIPM Pontianak.

Selain itu, tujuan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sertifikasi produk perikanan di SKIPM Pontianak ditujukan untuk melakukan perbaikan ketika ada unsur kepuasan masyarakat pada pelayanan sertifikasi produk perikanan di SKIPM Pontianak yang dibawah nilai mutu pelayanan pada setiap unsur kepuasan masyarakat. Secara khusus, tujuan survei kepuasan masyarakat di SKIPM Pontianak meliputi:

1. Mengetahui nilai mutu Layanan Penjaminan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Untuk Pengeluaran Dari Wilayah NKRI (Ekspor) di SKIPM Pontianak dan melakukan perbaikan ketika ada unsur kepuasan masyarakat pada unsur pelayanan ekspor produk perikanan lingkup SKIPM Pontianak yang di bawah nilai mutu pelayanan.
2. Mengetahui nilai mutu pelayanan pada unsur Pelayanan Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (HACCP) di SKIPM Pontianak dan melakukan perbaikan ketika ada unsur kepuasan masyarakat pada unsur pelayanan penerapan PMMT/HACCP di SKIPM Pontianak yang di bawah nilai mutu pelayanan.

3. Mengetahui nilai mutu pelayanan pada unsur pelayanan Sertifikasi CPIB Supplier di SKIPM Pontianak dan melakukan perbaikan ketika ada unsur kepuasan masyarakat pada unsur pelayanan sertifikasi CPIB di SKIPM Pontianak yang di bawah nilai mutu pelayanan.
4. Mengetahui nilai mutu pelayanan pada unsur pelayanan Jasa Pemeriksaan atau Pengujian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di SKIPM Pontianak dan melakukan perbaikan ketika ada unsur kepuasan masyarakat pada unsur pelayanan tersebut berada di bawah nilai mutu pelayanan.
5. Mengetahui nilai mutu pelayanan pada unsur pelayanan sarana prasarana penunjang pelayanan di SKIPM Pontianak dan melakukan perbaikan ketika ada unsur kepuasan masyarakat pada unsur pelayanan sarana prasarana pelayanan di SKIPM Pontianak berada di bawah nilai mutu pelayanan.

1.5. Manfaat

Manfaat dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat antara lain adalah:

- a. Mengukur kinerja penyelenggaraan pelayanan SKIPM Pontianak secara periodik.
- b. Sebagai bentuk partisipatif aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- c. Sebagai bahan penetapan kebijakan dalam perbaikan pelayanan dan penetapan standar pelayanan di SKIPM Pontianak.

1.6. Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah:

- a. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan.
- b. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
- c. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

BAB II

PENGUMPULAN DATA SKM

2.1. Pelaksana SKM

Pelaksanaan Kegiatan Survei terhadap Kepuasan Masyarakat Triwulan I Tahun 2025 dilakukan oleh SKIPM Pontianak dengan jumlah responden sebanyak 58 orang. Survei Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

2.2 Metode Pengolahan Data

Pengumpulan data dilakukan secara online melalui aplikasi SUSAN KKP (Survey Kepuasan Masyarakat Kementerian Kelautan dan Perikanan). Kuesioner yang masuk akan diolah dalam data entri komputer untuk mendapat hasil Survei Kepuasan Masyarakat. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat dihitung dengan menggunakan “Nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan, dalam menghitung Survei Kepuasan Masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan memakai rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang (0,071) dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur yang diisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilai SKM yaitu antara 25 – 100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

2.3. Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi pengumpulan data bersumber dari pengguna jasa yang ada dalam wilayah kerja SKIPM Pontianak yang meliputi Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kota Singkawang, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Mempawah, dan Kabupaten Landak.

2.4. Waktu Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan I tahun 2025 ini dimulai pada Bulan Januari 2025. Waktu pelaksanaan Survei dimulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2025.

Adapun waktu pelaksanaan dari tiap tahapan dapat dilihat pada jadwal berikut ini :

No	Kegiatan	Pelaksanaan
1	Persiapan	Januari Minggu I 2025
2	Pengumpulan Data / Survei SKM	Januari Minggu II s.d. Maret IV 2024
3	Analisa Data	April Minggu I 2025
4	Pelaporan dan Publikasi	April Minggu I 2025

2.5. Penentuan Jumlah Responden

Responden yang menjadi sasaran kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengguna jasa aktif yang melakukan kegiatan sertifikasi dan pengguna jasa lainnya yang ada pada SKIPM Pontianak.

BAB III

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

3.1. Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 58 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No	Karakteristik	Indikator	Jumlah	Persentase
1	Jenis Usaha	Perseorangan	8	86.21
		Korporasi	50	13.79
2	Jenis Kelamin	Laki	54	93.10
		Perempuan	4	6.90
3	Pendidikan	SD	7	12.07
		SMP	0	0.00
		SMA	31	54.45
		D3	1	1.72
		S1	19	32.76
		S2	0	0.00
4	Usia	< 25 tahun	3	5,17
		> 60 Tahun	0	0.00
		25 - 45 Tahun	34	58,62
		46 - 60 Tahun	21	36,21
5	Pekerjaan	P.UKPP	17	29.31
		Pelajar	3	5.17
		PNS	3	5.17
		Swasta	34	58.62
		Wirausaha	1	1.72

3.2 . Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan aplikasi dan diperoleh hasil sebagai berikut :

a. Nilai Survey kepuasan Masyarakat Per Jenis Layanan

Jenis Layanan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Nilai SKM	Respon den
Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	3.89	3.98	3.91	3.83	3.87	3.91	3.87	3.85	3.89	3.89	47
Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> (PMMT/ HACCP)	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	1
Jasa pengujian hama penyakit ikan karantina, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta kualitas air	3.75	3.75	3.50	4.00	3.75	3.75	3.75	3.50	4.00	3.75	4

b. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Per Unsur Pelayanan

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA- RATA TW IV 2024	NILAI RATA RATA TW I 2025	Naik / Turun
U1	Persyaratan Layanan	3.98	3.84	-0,14
U2	Kemudahan Prosedur	3.93	3.90	-0.03
U3	Waktu Penyelesaian	3.90	3.86	-0.04
U4	Kesesuaian Biaya	3.97	3.81	-0.16
U5	Kesesuaian Produk	3.95	3.81	-0.14
U6	Kecepatan Respon Aplikasi	3.85	3.88	-0.03
U7	Kemudahan Fitur Aplikasi	3.87	3.84	-0.03
U8	Kualitas Isi Aplikasi	3.85	3.81	-0.04
U9	Layanan Konsultasi	3.85	3.88	-0.03
Nilai Mutu Pelayanan Konversi		97.69	96.22	-1.47
Mutu Pelayanan		A	A	-
Kinerja Pelayanan SKIPM Pontianak		SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	-

BAB IV

ANALISIS HASIL SKM

4.1. Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat Triwulan I tahun 2025, telah dilakukan analisis penyebab permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan publik maupun pengambilan kebijakan dan disusun rencana tindak lanjut perbaikan.

Jawaban yang diberikan oleh 58 (lima puluh delapan) responden terhadap 9 unsur yang menjadi obyek Survei SKM, nilai persepsinya di atas angka 3 (tiga). Hal ini menunjukkan pelayanan yang diberikan petugas pelayanan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pontianak secara umum mencerminkan tingkat persepsi pelayanan yang baik.

Adapun nilai Survey Kepuasan Masyarakat Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Pontianak adalah sebesar 96.22. Untuk mengetahui Nilai Persepsi, Nilai Interval SKM, Nilai Interval Konversi SKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan, dihitung berdasarkan pada Keputusan Menpan Nomor: KEP/14/M.PAN RB/2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2. Nilai Persepsi, Interval SKM, Interval Konversi SKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Berdasarkan kriteria pada Tabel 2 di atas, maka hasil SKM Unit Pelayanan SKIPM Pontianak dengan Nilai Interval Konversi IKM sebesar 96.22, yaitu berada dalam nilai Interval IKM antara 3,5324 – 4,00. Nilai tersebut berada dalam kategori SANGAT BAIK, sehingga dikatakan bahwa Mutu pelayanan yang dilaksanakan di SKIPM Pontianak bernilai “A” atau kinerja Unit Pelayanan dan Mutu Pelayanan di Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pontianak masuk dalam kategori “SANGAT BAIK”.

Pengukuran survei kepuasan masyarakat terbagi menjadi 9 indikator. Masing-masing indikator dilakukan perhitungan tabulasi data untuk mendapatkan frekuensi dan persentase setiap unit pelayanan. Indikator tersebut dijelaskan dalam setiap tabulasi penilaian sebagai berikut:

1. Persyaratan layanan

Unsur persyaratan layanan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif; yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan persyaratan yang harus dipenuhi. Dari hasil tabulasi data responden, diperoleh hasil sebagai berikut: terdapat 58 responden memberikan persepsi sangat paham atau sebesar 100 %. Data unsur persyaratan layanan dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Unsur Persyaratan Layanan pada SKIPM Pontianak

No	Indeks Pelayanan	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Tidak Paham		0.00
2	Kurang Paham		0.00
3	Paham	9	15.52
4	Sangat Paham	49	84.48
Jumlah		58	100.00

Sumber : Data E-survei Triwulan I Tahun 2025

2. Kemudahan Prosedur

Unsur kemudahan prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan; kemudahan prosedur pelayanan terkait tata cara pelayanan. Hasil SKM Unsur prosedur pelayanan pada SKIPM Pontianak menunjukkan bahwa terdapat 6 responden atau 10.34% menjawab prosedur pelayanan yang tersedia mudah dipahami, serta 52 responden atau 89.66% menjawab bahwa prosedur pelayanan di SKIPM Pontianak sangat mudah dipahami.

Tabel 4. Kemudahan Prosedur pelayanan pada SKIPM Pontianak

No	Indeks Pelayanan	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Tidak Mudah	0	0.00
2	Kurang Mudah	0	0.00
3	Mudah	6	10.34
4	Sangat Mudah	52	89.66
Jumlah		58	100.00

Sumber : Data E-survei Triwulan I Tahun 2025

3. Waktu Penyelesaian Pelayanan

Unsur waktu penyelesaian pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh SKIPM Pontianak. Tanggapan responden terkait kuisisioner SKM diperoleh hasil terdapat 58 atau 100 % responden yang menyatakan bahwa waktu pelayanan telah sesuai dengan janji layanan yang ada. Data unsur waktu penyelesaian dapat dilihat pada tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5. Waktu Penyelesaian Pelayanan

No	Indeks Pelayanan	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Tidak Sesuai		0.00
2	Kurang Sesuai		0.00
3	Sesuai	8	13.79
4	Lebih Cepat dari yang Ditetapkan	50	86.21
Jumlah		58	100,00

Sumber: Data E-survei Triwulan I Tahun 2025

4. Kesesuaian Biaya/Tarif

Unsur kesesuaian biaya/tarif adalah kejelasan informasi tentang biaya/tarif yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan peraturan. Hasil kuisisioner menunjukkan bahwa sebanyak 58 atau 100 % responden menyatakan bahwa biaya / tarif pelayanan yang ada di SKIPM Pontianak sudah Sangat sesuai dengan peraturan yang ada. Tingginya persentase responden yang memberikan nilai dalam skala tertinggi atau 4 dapat diartikan pelayanan di SKIPM Pontianak khususnya terkait kesesuaian biaya/tarif transparan

dan sangat baik. Data unsur kesesuaian biaya/tarif dapat dilihat pada tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6. Biaya/ Tarif pelayanan pada SKIPM Pontianak

No	Indeks Pelayanan	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Tidak Sesuai	0	0.00
2	Kurang Sesuai	0	0.00
3	Sesuai	11	18.97
4	Sangat Sesuai	47	81.03
Jumlah		58	100,00

Sumber: Data E-survei Triwulan I Tahun 2025

5. Kesesuaian Produk spesifikasi jenis pelayanan

Unsur kesesuaian Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. Hasil SKM pada unsur kesesuaian produk spesifikasi jenis pelayanan pada SKIPM Pontianak menunjukkan bahwa 11 responden atau 18.90% menilai bahwa produk spesifikasi jenis pelayanan di Stasiun KIPM Pontianak sudah sesuai. Sedangkan 47 atau 81.03% menjawab bahwa produk spesifikasi jenis pelayanan sudah sangat Sesuai. Data unsur kesesuaian Produk spesifikasi jenis pelayanan dapat dilihat pada tabel 7 di bawah ini.

Tabel 7. Kesesuaian Produk Pelayanan pada SKIPM Pontianak

No	Indeks Pelayanan	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Tidak Sesuai	0	0.00
2	Kurang Sesuai	0	0.00
3	Sesuai	11	18.97
4	Sangat Sesuai	47	81.03
Jumlah		58	100,00

Sumber: Data E-survei Triwulan I Tahun 2025

6. Kecepatan Respon

Unsur kecepatan respon yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat. Secara keseluruhan, kemampuan yang dimiliki oleh Petugas Pelayanan pada SKIPM Pontianak menunjukkan indeks penilaian persepsi positif. Hal ini terlihat dari hasil SKM yang menunjukkan sejumlah 0 responden atau 0.00% menyatakan petugas pelaksana dalam memberikan respon pelayanan kepada masyarakat sangat lambat/lambat. Secara umum sebanyak 58 responden atau 100% menyatakan respon pegawai cepat/sangat cepat. Data unsur kecepatan respon dapat dilihat pada tabel 8 di bawah ini.

Tabel 8. Kecepatan Respon Petugas pada SKIPM Pontianak

No	Indeks Pelayanan	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Sangat Lambat	0	0.00
2	Lambat	0	0.00
3	Cepat	7	12.07
4	Sangat Cepat	51	87.93
Jumlah		58	100,00

Sumber: Data E-survei Triwulan I Tahun 2025

7. Kemudahan Fitur

Unsur Kemudahan Fitur yaitu baik atau tidaknya kemampuan pengguna pelayanan dalam mengakses fitur-fitur pelayanan yang ada di SKIPM Pontianak. Secara keseluruhan, kemudahan fitur pelayanan pada SKIPM Pontianak menunjukkan indeks penilaian persepsi positif. Hal ini terlihat dari hasil SKM yang menunjukkan sejumlah 0 responden atau 0.00 % menyatakan fitur pelayanan SKIPM Pontianak dinilai susah/agak susah dipahami. Namun secara umum sebanyak 58 responden atau 100 % menyatakan fitur pelayanan SKIPM Pontianak dinilai mudah/sangat mudah dipahami. Data unsur Kemudahan Fitur dapat dilihat pada tabel 9 sebagai berikut.

Tabel 9. Kemudahan fitur/kemampuan petugas pada SKIPM Pontianak

No	Indeks Pelayanan	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Sangat Susah	0	0.00
2	Agak Susah	0	0.00
3	Mudah	9	15.52
4	Sangat Mudah	49	84.48
Jumlah		58	100,00

Sumber: Data E-survei Triwulan I Tahun 2025

8. Kualitas Isi/Sarana

Unsur Kualitas Isi/Sarana yaitu segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pelayanan. Survey menunjukkan bahwa sebanyak 0.00 % atau 0 orang responden menilai bahwa fasilitas pelayanan yang ada di Stasiun KIPM Pontianak tidak ada/tidak berfungsi. Sedangkan 100 % atau 58 responden menyatakan bahwa sarana dan prasarana yang ada di SKIPM Pontianak sudah ada serta berfungsi maksimal dan dikelola dengan baik. Data unsur Kualitas Isi/Sarana dapat dilihat pada tabel 10 di bawah ini.

Tabel 10. Kualitas isi aplikasi/Sarana dan Prasarana Pelayanan pada SKIPM Pontianak

No	Indeks Pelayanan	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Tidak Ada	0	0.00
2	Ada tetapi tidak berfungsi	0	0.00
3	Berfungsi kurang maksimal	7	12.07
4	Berfungsi maksimal dan dikelola dengan baik	51	87.93
Jumlah		58	100,00

Sumber: Data E-survei Triwulan I Tahun 2025

9. Layanan Konsultasi berupa Tindak Lanjut Keluhan Pelanggan

Unsur Layanan Konsultasi yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. Pengguna layanan SKIPM Pontianak memiliki kemudahan dan keleluasaan dapat berkomunikasi untuk memberikan pengaduan, saran dan masukan serta difasilitasi agar pengaduan tersebut dapat tertangani dengan baik. Hasil survei SKM pada SKIPM Pontianak menunjukkan bahwa dari 58 responden yang mengisi kuisiuner, terdapat 58 responden atau 100 % responden memberikan penilaian baik/sangat baik. Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa SKIPM Pontianak telah menjalankan penanganan pengaduan yang baik dan responsif dalam menindaklanjuti setiap potensi permasalahan dari setiap pengguna layanan. Data unsur Layanan Konsultasi dapat dilihat pada tabel 11 di bawah ini.

Tabel 11. Pengaduan, saran dan masukan pada SKIPM Pontianak

No	Indeks Pelayanan	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Buruk	0	0.00
2	Cukup	0	0.00
3	Baik	11	18.97
4	Sangat Baik	47	81.03
Jumlah		58	100,00

Sumber: Data E-survei Triwulan I Tahun 2025

4.2. Rencana tindak Lanjut

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan perlu dibuatkan rencana tindak lanjut, yaitu sebagai berikut:

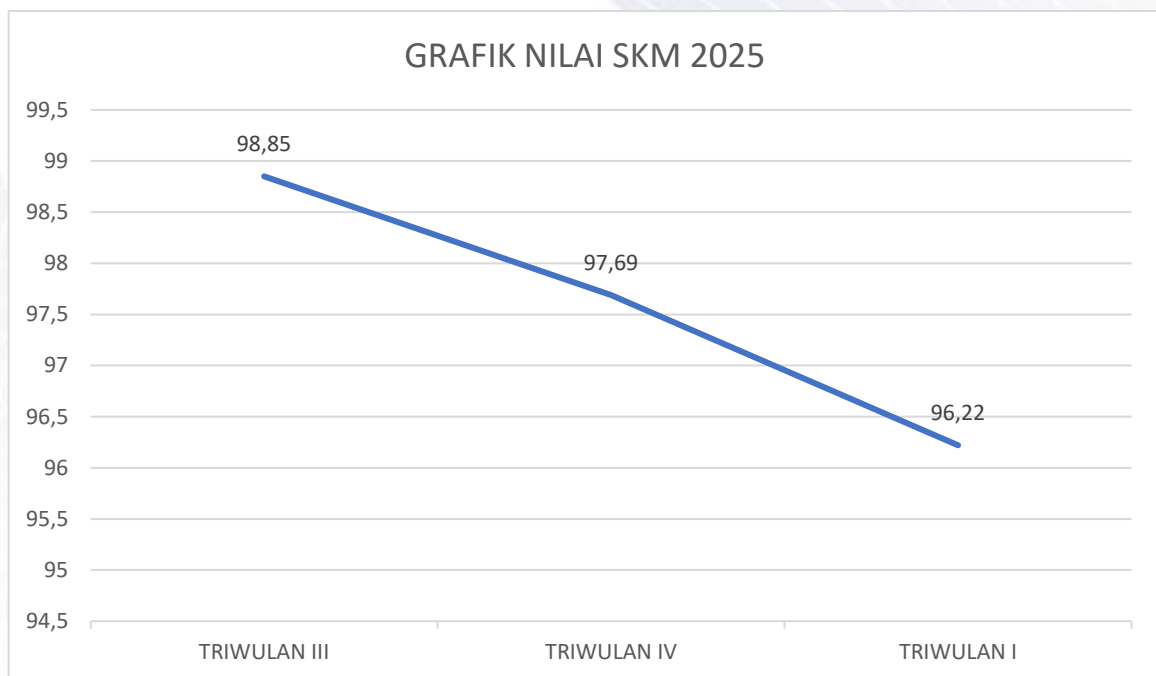
No	Jenis Layanan	Unsur Layanan Dengan Nilai Terendah	Penyebab	Rencana Tindak Lanjut	Time Line	PIC
1	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	1. Kesesuaian Produk 2. Layanan Konsultasi	Terdapat penyesuaian fitur-fitur dari aplikasi SIAP MUTU sebagai pengganti aplikasi SISKARIN	Berkoordinasi dengan admin SIAP MUTU Pusat untuk mengatasi gangguan fitur pada aplikasi SIAP MUTU	Bulan April 2025	1. Dannie Patria Ratin 2. Michelson Febrianto
2	Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> (PMMT/ HACCP)					
3	Jasa pengujian hama penyakit ikan karantina, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta kualitas air					



No	Jenis Layanan	Saran/Masukan	Tindak Lanjut	Time Line
1	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	1. Pelayanannya cepat, mudah, dan alurnya jelas 2. Semoga kedepannya lebih baik dan semakin mudah	Melakukan sosialisasi kepada tim pelayanan teknis untuk selalu meningkatkan pelayanan terbaik bagi pengguna jasa	April 2024
2	Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> (PMMT/ HACCP)			
3	Jasa pengujian hama penyakit ikan karantina, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta kualitas air			

4.3. Tren Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisis survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara umum menurun dari Triwulan III tahun 2024 sebesar 98.85 menjadi 97.69 di Triwulan IV, dan turun sebesar 96.22 di Triwulan I tahun 2025. Hal dapat dilihat melalui grafik berikut :



BAB V KESIMPULAN

Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat yang telah dilakukan oleh SKIPM Pontianak pada Triwulan I Tahun 2025 terdapat beberapa kesimpulan yang diperoleh, antara lain sebagai berikut:

1. Nilai SKM Periode Triwulan I Tahun 2025 dari survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan SKIPM Pontianak secara keseluruhan terdapat unsur pelayanan yang memiliki nilai tertinggi yaitu unsur pelayanan kecepatan respon dan kualitas isi/saran, sebesar 3.88. Sedangkan unsur pelayanan yang memiliki nilai terendah adalah unsur pelayanan kesesuaian biaya, kesesuaian produk dan layanan konsultasi, sebesar 3.81.
2. Hasil survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan SKIPM Pontianak pada periode Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar 96.22 dan termasuk dalam kategori SANGAT BAIK.